BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pembangunan di segala bidang dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya serta dapat berkarya nyata dalam membangun daerahnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti dalam operasionalisasi anggaran daerah lebih ditekankan pada alokasi sumber daya dan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasioanal anggaran yang memuat target dari pencapaian dari kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah melalui program-program yang akan dilaksanakan dan disertai dengan kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya untuk masa satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 yang dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan memiliki kedudukan yang strategis, maka dalam penetapan kebijakan-kebijakan yang tertuang didalamnya disepakati bersama secara oleh Dewan legislatif dan eksekutif, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Substansi dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat kesepakatan yang merupakan petunjuk dan ketentuan umum sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya dijabarkan dan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2023, yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas bertujuan untuk :

1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2024;
2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;

Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasonal.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 01).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2022 atas dasar harga konstan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 4724,62 Juta sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi sebesar Rp. 1247,95 Juta dan industri pengolahan sebesar Rp. 1241,14 Juta juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini..

Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 - 2022

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	3.922,76	5,45	4.122,57	5,09	4.264,91	3,45	4.494,70	5,39	4.724,62	5,12
2	Pertambangan &penggalian	40,07	8,59	43,17	7,74	42,48	-1,59	44,1	3,78	47,74	8,28
3	Industri pengolahan	1.087,00	6,32	1.155,32	6,29	1.167,50	1,05	1.196,36	2,47	1.241,14	3,47
4	pengadaan Listrik dan gas	20,13	6,34	21,28	5,67	23,15	8,82	24	3,67	25,04	4,34
5	pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-	-	1,21	-	0,13	3,02
6	Konstruksi	1.157,45	7,57	1.241,94	7,30	1.177,64	-5,18	1.198,51	1,77	1.247,95	4,12
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dansepeda motor	504,54	5,61	528,63	4,77	526,76	-0,35	541,84	2,68	565,42	4,35
8	trasportasi dan pergudangan	92,02	6,07	97,29	5,73	88,99	-8,53	91,95	3,33	96,58	5,04
9	penyediaan akomodasi danmakan minum	79,49	7,39	84,30	6,05	83,70	-0,70	84,62	1,1	88,10	4,11

10	Informasi dan komunikasi	54,59	8,21	58,74	7,6	64,14	9,19	67,80	5,7	71,42	5,35

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
11	jasa keuangan dan asuransi	58,45	1,24	59,33	1,5	59,77	0,75	63,35	5,98	66,53	5,03
13	real estate	223,47	5,36	234,73	5,03	243,43	3,71	243,72	0,12	251,76	3,30
	jasa perusahaan	3,93	4,83	4,11	4,43	4,05	-1,55	4,00	-1,03	4,10	2,50
14	administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	217,51	6,12	231,29	6,34	230,11	-0,51	229,70	-0,18	251,63	3,02
15	jasa pendidikan	29,96	6	31,49	5,13	32,15	2,1	33,16	3,13	34,19	3,10
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	40,56	5,37	42,66	5,17	42,25	-0,96	41,61	-1,52	43,90	5,50
17	Jasa lainya	236	4,92	2,47	4,95	2,46	0,62	2,60	5,83	2,71	4,30
PDRB Kabupaten Padang Lawas		7.534,30	5,96	7,959,31	5,64	8.053,50	1,18	8.362,13	3,83	8.747,96	4,61
PDRB Provinsi Sumatera Utara		512.762,63	5,18	539.516,85	5,22	553.746,36	-1,07	547.651,82	2,61	573.528,77	4,73

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka,Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor Lapangan Usaha dalam PDRB tahun 2022 atas dasar harga berlaku, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 7.338,87 Juta. Selain itu diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.526,54 Juta dan Sektor Konstruksi sebesar Rp. 2.191,99 Juta juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang lainnya sebesar Rp. 0,14 Juta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 - 2022

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	4.956,10	5.249,98	5.712,49	6.502,57	7.338,87
2	Pertambangan & penggalian	55,9	61,12	61,71	64,4	71,98
3	Industri pengolahan	1.818,25	1.969,80	2 .100,77	2.296,56	2.526,54
4	Pengadaan Listrik dan gas	20,86	22,14	24,11	25,17	26,30
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	0,14	0,14
6	Konstruksi	1.763,00	1.953,26	1.915,11	1.980,76	2.191,99
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	768,92	815,02	844,52	889,9	949,29
8	Trasportasi dan pergudangan	136,92	147,44	139,76	148,98	165,34
9	Penyediaan akomodasi dan makan Minum	115,04	123,79	124,12	125,79	133,28
10	Informasi dan komunikasi	60,88	66,68	74,26	80,44	86,30
11	Jasa keuangan dan asuransi	92,35	93,75	94,1	104,1	112,47
12	Real estate	393,89	433,38	447,38	460,15	502,62
13	Jasa perusahaan	6,18	6,63	6,88	6,94	7,27
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	311,7	335,85	343,6	342,8	353,85
15	Jasa pendidikan	40,28	43,45	45,68	47,28	49,31
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	51,78	56,51	58,89	58,64	66,26
17	Jasa lainnya	3,84	4,19	4,26	4,53	4,95
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**10.595,87**	**11.371,99**	**11.997,10**	**13.139,14**	**14.586,76**
PDRB Provinsi Sumatera Utara		**741.347,43**	**799.608,95**	**811.188,31**	**859.934,26**	**955.193,09**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka,Tahun 2023
PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 berada pada sektor lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai sebesar 50,31 persen, Sedangkan distribusi paling rendah terdapat pada sektor Jasa lainnya dengan nilai sebesar 0,03 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini..

Tabel. 2.3
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

No	Sektor	Distribusi PDRB ADHB (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	46,77	46,17	47,62	49,49	50,31
2	Pertambangan dan penggalian	0,53	0,54	0,51	0,49	0,49
3	Industri pengolahan	17,16	17,32	17,51	17,48	17,32
4	Pengadaan Listrik dan gas	0,20	0,19	0,20	0,19	0,18
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	16,64	17,18	15,96	15,08	15,03
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	7,26	7,17	7,04	6,77	6,51
8	Trasportasi dan pergudangan	1,29	1,3	1,16	1,13	1,13
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,09	1,09	1,03	0,96	0,19
10	Informasi dan komunikasi	0,57	0,59	0,62	0,61	0,59
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,87	0,82	0,78	0,79	0,77
12	Real estate	3,72	3,71	0,73	3,5	3,45
13	Jasa perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,94	2,95	2,86	2,61	2,43
15	Jasa pendidikan	0,38	0,38	0,38	0,36	0,34
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	0,49	0,5	0,49	0,45	0,45
17	Jasa lainya	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 terdapat pada sektor Jasa Pertambangan dan penggalian dengan nilai sebesar 8,28 persen, Sedangkan pertumbuhan paling renda terdapat pada sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,02 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawahini.

Tabel. 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

No	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi ADHK (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	5,45	5,09	3,45	5,39	5,12
2	Pertambangan dan penggalian	8,59	7,74	-1,59	3,78	8,28
3	Industri pengolahan	6,32	6,29	1,05	2,47	3,74
4	Pengadaan Listrik dan gas	6,34	5,67	8,82	3,67	4,34
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-			-	3,02
6	Konstruksi	7,57	7,3	-5,18	1,77	4,12
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	5,61	4,77	-0,35	2,68	4,35
8	Trasportasi dan pergudangan	6,07	5,73	-8,53	3,33	5,04
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,93	6,05	-0,7	1,1	4,11
10	Informasi dan komunikasi	8,21	7,6	9,19	5,7	5,35
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,24	1,5	0,75	5,98	5,03
12	Real estate	5,36	5,03	3,71	0,12	3,30
13	Jasa perusahaan	4,83	4,43	-1,55	-1,03	2,50
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,12	6,34	-0,51	-0,18	3,02
15	Jasa pendidikan	6,00	5,13	2,1	3,13	3,10
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,37	5,17	-0,96	-1,52	5,50
17	Jasa lainya	4,92	4,95	-0,62	5,83	4,30
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**5,96**	**5,64**	**1,18**	**3,83**	**4,60**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

Kabupaten Padang Lawas berada pada Wilayah Pantai Barat. Adapun Kabupaten yang termasuk di dalamnya adalah : Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas sebesar 4,61 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Tahun 2021
Kota Padangsidimpuan	4,77
Kabupaten Tapanuli Selatan	4,78
Kabupaten Mandailing Natal	4,34
Kabupaten Padang Lawas Utara	4,12
Kota Sibolga	4,15
Kabupaten Tapanuli Tengah	4,18
Kabupaten Padang Lawas	4,61
Provinsi Sumatera Utara	4,73
Nasional	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

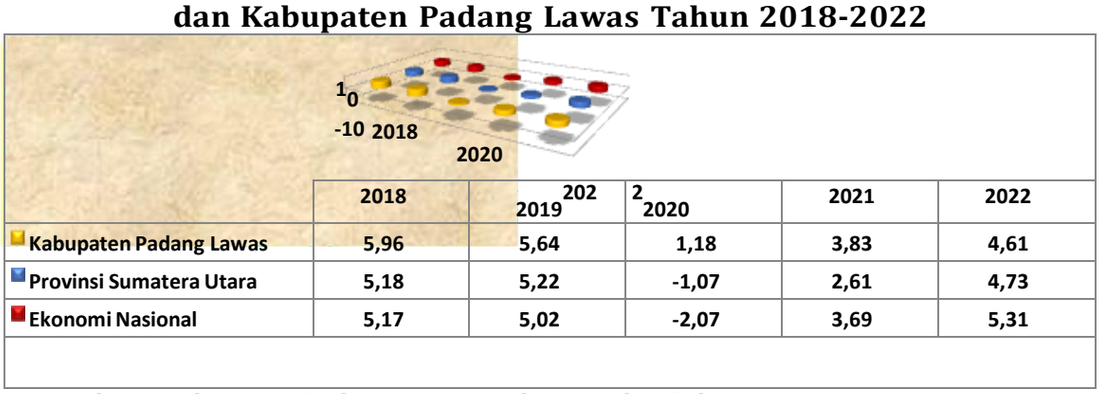
Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Indikator	Target	Realisasi	Target Setelah Perubahan		
	2022	2022	2023	2024	
Pertumbuhan Ekonomi	5,00	4,61	4,00	4,50	

Sumber : PRPJMD Kabupaten Padang Lawas 2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus mengalami Fluktuasi, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas yang terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 1,18 persen, sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,96 persen. Hal serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dimana pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar -1,07 persen, dan yang tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 5,22 persen, dan pada pertumbuhan ekonomi Nasional yang terendah terjadi pada tahun 2020 yakni dengan nilai sebesar -2,07 persen sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Hal ini dapat di lihat pada gambar.

Gambar 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Padang Lawas	5,96	5,64	1,18	3,83	4,61
Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Ekonomi Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi merupakan salahsatu indikator dalam perencanaan pembangunan satu daerah atau wilayah.Dengan inflasi dapat diukur persentase kenaikan harga barang/jasa yangsecara umum dikonsumsi oleh masyarakat.Kabupaten Padang Lawas bukan merupakan salah satu kota tempatsurvei inflasi. Inflasi di Kabupaten Padang Lawas mengacu pada KotaPadangsidimpuan. Pada tahun 2022 laju inflasi Kota Padangsidimpuanmenurut kelompok komoditi yang tertinggi terdapat pada komoditi Transportasi, komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 12,44 persen, sementarakelompok komoditi terendah terdapat pada komoditi Sandang yaitu sebesar 1,66 persen. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Laju Inflasi Kota Padangsidimpuan Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2017- 2021

Kelompok	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi Umum	2,22	2,15	3,27	0,48	4,46
Bahan Makanan	-1,92	-0,68	3,18	0,00	3,76
Makanan Jadi, minuman, rokok /tembakau	4,64	2,1	5,7	1,36	5,92
Perumahan, air, listrik, gas & Bahan Bakar	2,03	1,99	0,14	-0,83	2,73
Sandang	4,12	5,51	0,28	0,79	1,66
Kesehatan	2,65	8,77	1,03	-0,07	5,43
Pendidikan, rekreasi & Olahraga	2,66	9,73	-0,3	2,33	4,58
Transportasi, komunikasi & Jasa Keuangan	5,52	0,28	-7,76	-0,15	-12,44

Sumber : Padangsidimpuan Dalam Angka, Tahun 2023

Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (giniratio), dimana berkisar antara 0 sampai 1.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas menunjukkan gini ratio Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu 2018 -2022 termasuk dalam kategori ketimpangan yang merata. Gini ratio Kabupaten Padang Lawas yang terkecil terdapat pada tahun 2019 yakni sebesar 0,231 poin, sedangkan yang tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,299 poin. Sementara gini ratio Provinsi Sumatera Utara gini ratio yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,318 poin sedangkan untuk yang terkecil terdapat di tahun 2022 yaitu sebesar 0,312 poin.Ketimpangan tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Padang Lawas masih dalam tingkat kesenjangan yang baik. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel perbandingan *Gini Cofficient* Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.8
***Gini Cofficient* Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Kabupaten Padang Lawas	Provinsi Sumatera Utara
1	2018	0,299	0,318
2	2019	0,231	0,317
3	2020	0,265	0,316
4	2021	0,252	0,314
5	2022	0,227	0,312

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Sedangkan jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat Tahun 2022 *Gini Cofficient*

Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 3 (tiga) dengan nilaisebesar 0,245 poin.

Tabel 2.9
***Gini Cofficient* Wilayah Pantai Barat 2018-2021**

No	Kab/Kota	Gini Ratio (Poin)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Padangsidimpuan	0,359	0,359	0,359	0,317	0,275
2	Kabupaten Padang Lawas	0,299	0,231	0,265	0,252	0,227
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,273	0,272	0,272	0,256	0,209
4	Kabupaten Mandailing Natal	0,257	0,257	0,257	0,240	0,244
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,299	0,298	0,298	0,255	0,245
6	Kota Sibolga	0,303	0,303	0,303	0,276	0,346
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,317	0,317	0,317	0,292	0,233
	Rata-rata	**0,301**	**0,3**	**0,3**	**0,269**	**0,254**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Aspek Pelayanan Umum

Urusan Pemerintah Wajib dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yangterbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

Tingkat Capaian Target SPM Urusan Pendidikan

Tingkat capaian target SPM Urusan Pendidkan Kabupaten Padang Lawas mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2018	2019	2020	2021	2022
I	**Pendidikan**								
	Pendidikan formal								
	SD/ MI (Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah)	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	95%	2024	98,49%	99,96%	99,98%	99,97%	99,98%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2024	0,13%	0,30%	0,30%	0,25%	2%
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2024	68%	60%	60%	62%	63%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90%	2024	70%	20%	20%	20%	25%
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	80%	82%	82%	85%	86%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95%	2024	90%	92%	92%	95%	96%
		Jumlah siswa per kelas	32 siswa/kelas	2024	34	32	32	32	32
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2024	80%	50%	50%	50%	65%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95%	2024	90%	89%	89%	90%	92%
	SMP/ Mts	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	90%	2024	85%	80%	81%	91%	90%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2024	1,18%	1,22%	1,18%	0,70%	2,00%
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2024	75%	70%	61%	70%	65%
		Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80%	2024	70%	70%	45%	47%	48%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	80%	2024	70%	70%	5%	7%	72%

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2018	2019	2020	2021	2022
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	90%	85%	90%	87%	92%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	90%	2024	100%	95%	98%	98%	98%
		Jumlah siswa per kelas	36 siswa	2024	36	36	36	36	36
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2024	90%	90%	90%	60%	90%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	70%	2024	70%	85%	88%	87%	88%
	Pendidikan Non Formal	Bisa membaca dan menulis	85%	2024	80%	85%	98%	98%	98%
		Orang buta aksara dalam kelompok usia 14 - 44 tahun	< 10%	2024	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
	Kesetaraan SD (program Paket-A)	Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/ MI	< 10%	2024	1,34%	1,29%	1,22%	1,12%	1,10%
		Peserta didik Paket A yang tidak aktif	< 5%	2024	0,14%	0,12%	0,10%	0,10%	0,20%
		Kepemilikan modul	50%	2024	79,50%	79,87%	80,50%	85,87%	88,70%
			<1%	2024	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,20%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	95%	2024	98,80%	99,80%	98,78%	99,90%	97,90%
		Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/ MTs) atau Program Paket B	90%	2024	99,87%	99,70%	99,80%	90,00%	98,82%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2024	80%	80%	80%	80%	80%

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2017	2018	2019	2020	2021
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan	90%	2024	20%	20%	20%	80%	70%
		Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	78%	78%	78%	78%	80%
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	50%	50%	50%	35%	50%
		Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar	100%	2024	60%	60%	60%	60%	60%
	Kesetaraan SMP (Program Paket B)	Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/ MT	<10%	2024	1,22%	1,18%	0,18%	0,18%	0,22%
		Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif	<5%	2024	10%	10%	0,2%	0,2%	0,20%
		Kepemilikan Modul	100%	2024	60%	70%	30%	30%	30%
		Program paket B oleh peserta didik	<2%	2024	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	50%	2024	70%	70%	90%	90%	93%
		Jumlah lulusan Program PaketB yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA atau Program Paket C)	50%	2024	70%	70%	80%	80%	92%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90%	2024	80%	90%	70%	70%	80%

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2017	2018	2019	2020	2021
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan	100%	2024	70%	70%	20%	20%	35%
		Kualifikasi tutor Program Paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	70%	70%	60%	60%	60%
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	40%	50%	40%	40%	40%
	Kasetaraan SMA (Program Paket C)	Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/ MA/ SMK	<10%	2024	2,68%	2,34%	0,80%	0,80%	0,80%
		Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif	< 5%	2024	20%	20%	1,50%	1,50%	2,00%
		Kepemilikan Modul	60%	2024	50%	60%	20%	20%	20%
		Program paket C oleh peserta didik	<5%	2024	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	60%	2024	90%	90%	98,50%	98,50%	99%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja	10%	2024	20%	20%	10%	10%	10%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi	90%	2024	40%	50%	2%	2%	2%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2024	80%	90%	98,50%	98,50%	98,50%
		Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	70%	80%	60%	60%	60%

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2017	2018	2019	2020	2021
		Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	40%	40%	30%	30%	30%
	Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian	Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang	25%	2024	5%	5%	10%	10%	10%
		Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100%	2024	50%	50%	65%	60%	60%
		Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	10%	2024	1%	1%	1%	1%	1%
		Kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang dibina secara terus menerus	50%	2024	10%	10%	40%	40%	40%
		Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	20%	2024	0,05%	0,05%	0,08%	0,08%	0,08%
		Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek dari kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperlukan	100%	2024	30%	30%	50%	50%	50%

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2017	2018	2019	2020	2021
		Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	90%	2024	60%	60%	60%	60%	60%
		Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat	100%	2024	90%	95%	98%	95%	98%
		Jumlah kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	70%	2024	40%	40%	50%	50%	50%
		Tersedianya data dasar kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperbarui terus menerus	100%	2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Taman Kanak-kanak	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun yang mengikuti program TK/ RA	20%	2024	50%	55%	95%	95%	95%
		Guru yang layak mendidik TK/ RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	30%	35%	40%	59%	40%
		TK/ RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	90%	2024	78%	78%	78%	80%	85%
		TK/ RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri	60%	2024	35%	35%	35%	40%	35%
	Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat	Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	65%	2024	60%	60%	60%	60%	60%

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2018	2019	2020	2021	2022
		Jumlah Anak usia 4 - 6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal	50%	2024	10%	10%	10%	10%	10%
		Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	50%	2024	40%	50%	50%	50%	50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena kesehatan menjadi salah satu penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

Tingkat Capaian Target SPM Urusan Kesehatan

Tingkat capaian target SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Padang Lawas mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
Kesehatan								
Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2020	45	54	39%	39%	39%
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2020	51,9	38,2	10%	10%	7,3%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2020	42,6	10,9	50%	50%	49,4%
	Cakupan pelayanan nifas	90%	2020	58,2	43,2	51%	48%	82%
	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	80%	2020	14,9	12,42	6%	6%	1,8%
	Cakupan kunjungan bayi	90%	2020	89,3	70,73	90%	90%	52,2%
	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2020	29,9	78	100%	28%	65,78 %
	Cakupan pelayanan anak balita	90%	2020	80	40	46%	46%	28,5%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	2020	98	_	100%	100%	-
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2020	100	100	100%	100%	100%

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2020	61	100	100%	99%	96,73 %
	Cakupan peserta KB aktif	70%	2020	81,2		99%	100%	100%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota	100%	2020	100	100	100%	100%	66,7%
Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2020	31	86,50 %	80%	80%	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Persentase jalan kabupaten Padang Lawas dalam kondisi Baik dari tahun 2021 Sebesar 18,92 persen terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 25,60 persen, Kondisi Sedang Pada tahun 2021 Sebesar 34,23 persen, mengalami penurunan pada tahun 2022 Sebesar 27,40 persen.

Penataan Ruang

Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Penataan Ruang adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub bidang penataan ruang, yakni persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, capai kinerja ini masih belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan dikarenakan hingga akhir tahun 2017 fokus penyelenggaraan penataan ruang adalah masih terkait proses legalisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan target memiliki dokumen dan regulasi penataan ruang hingga rencana rinci tata ruang.

Tabel 2.12
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
PekerjaanUmum								
Sumber Daya Air	Tersedianya air baku utk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	40%	Setiap Tahun	12%	15%	30%	35%	36%
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	50%	Setiap Tahun	30%	40%	45%	48 %	50%
Jalan								
Jaringan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kab/ kota (aksessibilitas)	100%	Setiap Tahun	85	92	99	100	100
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan (mobilitas)	80%	Setiap Tahun	64,51	66	73	77	79
Ruas Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	60%	Setiap Tahun	24,1	26,07	49,95	54	53
	Tersedianya jalan yang menjamin kenderaan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	Setiap Tahun	24,1	26,07	49,95	54	53
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	25%	Setiap Tahun	14,42	16,02	17,74	23	25,60
Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	25%	Setiap Tahun	10%	13%	15%	16%	20,5%

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2020	2022
Sanitasi lingkungan								
Air limbah	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai		Setiap Tahun	-	-	-		-
	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota		Setiap Tahun	-	-	-		-
Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		Setiap Tahun	-	-	-		-
	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan		Setiap Tahun	-	-	-		-
Drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun	35%	Setiap Tahun	20%	25%	30%	34%	41,5%
Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		Setiap Tahun	-	-	-		-
Penataan bangunan dan lingkungan	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kab/ Kota		Setiap Tahun					-
	Tersedianya pedoman Harga standard Bangunan Gedung Negara di kab/ kota	100%	Setiap Tahun	-	-	100%	100%	100%
Jasa Konstruksi	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyarakat lengkap		Setiap Tahun	-	-	-	100	-
	Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruktur		Setiap Tahun	-	-	-		-
Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kab/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		Setiap Tahun	-	-	-		-
	Terlaksananyaa penjaringan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukaan		Setiap Tahun	-	-	-		-

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2017	2018	2019	2020	2021
	minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang							
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW kab/ kota beserta rencana Rincinya		Setiap Tahun	-	-	-		-
	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja		Setiap Tahun	-	-	-		-
	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan Perkotaan		Setiap Tahun					-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Perumahan Rakyat

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 648.II/058-3/KPTS/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Lawas dengan total luas sebesar 234,42 Ha.

Tabel 2.13
Realisasi SPM Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman Perhubungan

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
Perhubungan									
Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	99%	2020	20,00	20	20	20	-
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota,	99%	2020	20,00	20	20	20	-
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	99%	2020	13,64	13,36	13,36	13,36	-
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	99%	2020	-	-	-	-	-

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota,	99%	2020	-	-		-	-
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	99%	2020	-	-	-	-	-
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal,	99%	2020	-	-	-	-	-
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor,	99%	2020	-	1	1	1	-
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota,	99%	2020	-	-	-	-	-

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	99%	2020	33,33	40	40	40	-
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota,	99%	2020	5,13	5,125	5,13	5,13	-
Perumahan									
Perumahan	Rumah Layak Huni Dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	60,900	100%	63	65	66	100	69
		Cakupan rumah layakhuniterjangkau	60,900	100%	63	65	66	100	69
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	55%	2020	53%	54%	55%	67%	68%

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator capaian urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 antara lain adalah cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran k3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran dan persentase penegakan peraturan daerah. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran k3, tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran dan persentase penegakan peraturan daerah mempunyai nilai persentase yang sama. Sedangkan cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami nilai yang fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.68
Indikator Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	100	100	100	100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	80	79	78	80	80
Tingkat Waktu Tanggap Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	>15	>15	>15	>15	>15
Persentase Penegakan Peraturan Daerah	95%	95%	95%	95%	95%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Tabel 2.14
Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat								
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	-	-	100	100	100	100	100
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	100	2020	93	94	97	100	100
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	100	Akhir Tahun	80	79	78	80	80
	(Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	>15	Sampai dilokasi	>15	>15	>15	>15	>15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Padang Lawas 2023

Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2022 terlihat jelas bahwa persentase PMKS yang tertangani masih sangat cukup besar yaitu 50,1 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel indikator kinerja urusan sosial di bawah ini:

Tabel 2.15
Indikator Capaian Urusan Sosial Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2021
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	4,29	1,89	0	0,36	49,9
PMKS yang tertangani (%)	6,84	2,01	0,24	17,75	50,1
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	0	70,13	77	100	100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	0	0	0	0
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	2,55	0	0	43,5	43,5

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2023

Tabel 2.16
Realisasi SPM Bidang Sosial

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
VI	**Sosial**								
	Pelaksanaan Program/ Keg bidang Sosial Skala Kab/ kota								
	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesra (PMKS) Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2	2024	-	2	2,22	0	49,3
	Pelaksanaan kegiatan sosial bagi PMKS Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS skalaKab/ Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1	2024	-	0	0	0	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Skala Kab/ kota								
	Penyediaansarana dan prasarana panti sosial skala Kab/ kota	Persentase (%) pantisosialskalakab/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1	2024	-	-	0	0	0
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kab/kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	1	2024	-	-	0	0	0
	Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kab/ kota								

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2018
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100	2024	-	70,13	100	100	100
	Evaluasi korban bencana skalakab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	100	2024	-	0	0	0	0
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kab/ kota								
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/ kota	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan social	1	2024	-	1	0	0	0

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Tenaga Kerja

Indikator kinerja urusan tenaga kerja dari tahun 2018 dan 2022 di Kabupaten Padang Lawas yang tidak ada angkanya yakni keselamatan dan perlindungan dan rasio kelulusan S1/S2/S3. Meskipun demikian ada beberapa indikator capaian kinerja urusan tenaga kerja yang nilainya fluktuatif. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pasa tabel di bawah ini :

Tabel 2.17
Indikator Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2	9	20	-	1
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	2	4	-	1	-
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan	209	188	199	100	131
Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	5.689	6.751	7.212	7,415	10,029
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	64	-	68	6-	60
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	20	-	20	40	-
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 1 orang, persentase pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Padang Lawas adalah sebanyak 0,91 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
1	Kabupaten Padang Lawas	2412 Orang	1 Orang	0,91 %	0,03 %

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2023

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukan caman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar 0,0033 persen dengan jumlah kekerasan sebesar 2 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19
Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

No	Wilayah	Jumlah Kekerasan	Jumlah Rumah Tangga	Rasio Kekerasan (%)
1	Kabupaten Padang Lawas	19	60.763	0,0033

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secaraberkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Ketersediaan pangan utama (Kg) Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami keadaan yang fluktuatif. Tahun 2022 ketersediaan pangan utama Kabupaten Padang Lawas sebesar 150,24,00 Kg, dengan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebesar Rp Rp 9,931,781 kapita per tahun. Untuk lebih jelasnya dapatdi lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Indikator Capaian Urusan Pangan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	230,115,00	224,646,75	230,115,00	188,190,03	150,24,00
Ketersediaan energi (kkl/kap/hr) dan protein perkapita (kap/hr)	E=2000 P=51,06	E=1900 P=55	E=2000 P=51,06	E=2000 P=51,06	E=2106 P=69,73
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	–	–	–	2.03	0
pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (rp/kap/thn)	8,118,000	8,172,000	8,280,000	8,467,000	9,931,781
konsumsi beras (rp/kap/thn)	1,245,440	1,276,500	1,276,500	1,276,000	1,548,450
konsumsi ikan (rp/kap/thn)	638,08	1,460,600	1,451,800	1,420,000	1,458,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA), urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Banyaknya jenis sertifikat menurut jenis hak atas tanah di Kabupaten Padang Lawas sangat mempengaruhi tingkat pembangunan dengan surat sertifikat yang sudah semakin berkembang. Tahun 2022 jenis hak milik di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 1.694 sertifikat. Sedangkan, untuk hak guna bangunan sebanyak 88 sertifikat dan pada hak pakai sebesar 69 sertifikat dan untuk hak pengelola dan hak guna usaha belum ada data jenis hak sertifikat tersebut di Kabupaten Padang Lawas. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Banyaknya Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

Wilayah	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelola	Hak Guna Usaha
Kabupaten Padang Lawas	1.694	88	69	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2022

Lingkungan Hidup

Tahun 2022 persentase penanganan sampah yang tertangani di Kabupaten Padang Lawas sebesar 13,00 persen, persentase tersebut merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan, untuk jumlah timbunan sampah yang di daur ulang di Kabupaten Padang Lawas masih belum ada, hal ini di sebabkan untuk perkembangkan dan proses industri tersebut di Kabupaten Padang Lawas masih belum ada. Pada tahun 2022 status pencemaran air sungai di Kabupaten Padang Lawas Masih Mengalami Ringan, hal ini menunjukkan bahwa masih belum sadarnya masyarakat melakukan pencemaran air sungai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017 - 2021

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Status Pencemaran Air Sungai	77,78%	77,78%	77,78%	Ringan	Ringan
2	Tutupan Lahan (Lahan Kritis)	-	-	-	51,03%	51,03%
3	Persentase Sampah Kabupaten Yang Tertangani	5,67%	6,09%	6,09%	9,85%	9,85%
4	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
5	Jumlah Peserta Proper Yang Mencapai Minimal Ranking BIRU	2	2	2	2	2
6	Jumlah Timbunan Sampah Yang Di Daur Ulang	-	-	-	-	-
7	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Jumlah penanganan sampah di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Jumlah sampah yang tertangani tertinggi terdapat di tahun 2022 yaitu sebesar 8,760 ton atau 13,00persen. Sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,99 atau 5,67persen. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Penanganan Sampah Tertangani di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 - 2022

Wilayah	2018		2019		2020		2021		2018	
	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen
Kabupaten Padang Lawas	3,99	5,67	4,38	6,09	4,38	6.09	6,57	9,85	8,760	13,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Tahun 2022 perkiraan jumlah penanganan timbunan sampah di Kabupaten Padang Lawas per harinya sebesar 187.092 kg/jiwa/hari, sedangkan

jika setahun 67.727.304 kg/tahun. hal tersebut dapat di pengaruhi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas yakni 267.275 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Wilayah	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/ jiwa/ hari)	Total Timbulan Sampah (kg/thn)
Kabupaten Padang Lawas	267,275 Jiwa	187.092	67.727.304

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga diakomodir melalui pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ditindak lanjuti melalui pembinaan, pengawasan sampai ke penegakan hukum.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Padang Lawas semakin maningkat. Tahun 2022 penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas. Untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertinggi di Kabupaten Padang Lawas di tahun 2022 sebesar 155,91 jiwa dan yang terkecil di tahun 2018 sebesar 147,291 jiwa. Sedangkan untuk cakupan penerbitan akta lahir di Kabupaten Padang Lawas tahun tertinggi terdapat di tahun 2022 yaitu 125,016 jiwa dan yang terendah terdapat di tahun 2018 sebesar 99,109 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	54,85	88,28	88,04	90,41	90,41
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	75,01	79,44	85,78	86,77	86,77
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	19,05	26,03	50,69	56,31	56,31
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	147,291	150,724	152,501	155,91	155,91
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99,109	109,104	111,483	125,016	125,016

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat tertinggi di Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 sebanyak 41,05 LPM, Sedangkan yang terendah di tahun 2022 dan 2019 yaitu sebesar 41,04 LPM. Untukpersentase LPM berprestasi tertinggi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu 10 persen dan terendah di tahun 2019 yaitu sebesar 0,6 persen. Untuk rata- rata jumlah kelompok binaan PKK tertinggi di Kabupaten Padang Lawas terdapat di tahun 2020 yaitu 32 binaan dan yang terendah di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 10 binaan. Beberapa capaian terhadap indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	08,55	0,67	10	26,7	26,7
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	16	41,05	41,04
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10	10	32	26,9	26,9
4	Persentase LPM Berprestasi	0,90	0,6	10	10	10
5	Persentase PKK aktif	0,723	0,69	81	97,6	97,6
6	Persentase Posyandu aktif	1,03	0,69	81	33,43	33,01

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2023

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan"dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,dan persebaran penduduk yang merata.Jumlah penduduk, komposisi umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen - komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk (Lucas,1990:1).

Data terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Padang Lawas sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,22	2,2	1,91	1,75	1,78
2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,3	2,2	3,77	3,7	3,67
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	50	50	100	65	75
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	57,89	60	65	65	60
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	-	1	1
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	3,7	5	4,2	5	3
9	Ratio Akseptor KB (%)	-	-	-	74,23	80,92
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49 (%)	75	78	48,5	80,07	10,56
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1,000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	11,5	12	84	84	80
13	Cakupan Pasangan Muda Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun (%)	10,2	10	56,6	58	50
14	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	20,12	18	25	11,35	28
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	25	30	25	25,77	35
16	Persentasi Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	35	41	65	65	60

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	90	91	75	74	70
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	89	98	65	59	65
19	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	90	91	65	44	65
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	-	-	-	1	5
21	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	55	65	30	30	30
22	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	30,5	35,5	100	100	100
23	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri (%)	20	50	10	65	15
24	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100
25	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kota (%)	15,76	78,8	100	100	100
26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	10,21	15	100	100	100
27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	100	100	100	100	100
28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	100	100	35	22	45
29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	0	0	0	20	0
30	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	70	75	70	64	70

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (%)	69	76,8	75	45	70
32	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	25	30	18	21	20
33	Persentasi Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes (%)	-	-	50	0,014	20

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dan interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada 2018sebanyak 14.253 jiwa meningkat di tahun 2022 menjadi 15.470 jiwa. Peningkatan ini juga di dukung dengan peningkatan Jumlah Kir angkutan umum dan peningkatan persentase layanan angkutan darat. Jumlah Kir angkutan umum pada tahun 2018 sebesar 3,65 persen menjadi 4,3 persen pada tahun 2022. Peningkatan persentase layanan angkutan darat pada tahun 2018 menjadi 26,750 persen menjadi 27,186 persen pada tahun 2022 Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 17.013,758 jiwa/barang dan pada tahun 2022 sebanyak 19,406 jiwa/barang. Indikator capaian urusan perhubungan Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana berikut ini

Tabel 2.28
Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	14.253	14.303	15.970	15.137	15.470
2	Rasio Ijin Trayek	0,00122	0,00114	0,00114	0,00114	0,25000
3	Jumlah Kir Angkutan Umum	3,65	3,85	430	217	4,3
4	Persentase Layanan Angkutan Darat	26,750	27,172	27,200	27,186	27,186
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	25,14	25,97	29	27,49	27,49
6	Pemasangan Rambu-rambu	40	50	55	53	53,03
7	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	3,85	4,05	4,52	4,29	4,3
8	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	17.013,758	17.558,198	19.605	9,803	9,406

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Komunikasi dan Informatika

Di era globalisasi ini teknologi menjadi kebutuhan untuk mengakses informasi dan meningkatkan kualitas komunikasi. Aktifitas *network* globalisasi ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan dari teknologi informasi bukan hanya mengubah pola produktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan tingkat produktivitas dan pada saat bersamaan juga menyebabkan perubahan struktural dalam kehidupan politik, kebudayaan, kehidupan sosial masyarakat dan juga konsep waktu dalam berbagai lapisan masyarakat. Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas dalam upaya mendukung pencapaian clean goverment dan good goverment melalui e- goverment sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pada tahun 2022 cakupan pelayanan telekomunikasi sebesar 81% persen masih lebih besar dibandingkan dengan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan sebesar 11% persen. Keberhasilan Kabupaten Padang Lawas terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	8,58%	11,10 %	11,10 %	11%	11%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	58,14%	81,40 %	81,40 %	81%	81%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023s

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil merupaka peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Indikator keberhasilan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari persentase koperasi aktif di kabupaten padang lawas yang terus meningkat dari 3,16 persen pada tahun 2018 menjadi 13,31 persen pada tahun 2021. Untuk jumlah koperasi aktif di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami keadaan yang fluktuatif. Dimana jumlah koperasi aktif paling sedikit terdapat pada tahun 2019 sebanyak 4 koperasi aktif dan yang paling banyak terdapat di tahun 2021 sebanyak 56 koperasi aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase koperasi aktif	3,16	1,02	1,63	13,31	0,48
2	Jumlah koperasi aktif	12	4	6	56	2
3	Jumlah koperasi Kabupaten Padang Lawas	380	392	396	421	414
4	Provinsi Sumatera Utara	4,667	4,199	4,593	5,033	

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023
Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing

PMA untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Padang Lawas sehingadapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Berikut ini disampaikan perkembangan realisasi indikator kinerja urusan penanaman modal dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.31
Realisasi Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	15	10	17	18
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	2	3	2
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	306.2328.556.71,6 (Rp. PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	306.232.855.671.60 (Rp. PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	406.232.855.671.60 (PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	343.443.120.062 (RpPMDN) 1782660879 ($ PMA)	734.194.950 (RpPMDN) 51163267 ($ PMA)
4	Rasio daya serap tenaga kerja	1,85	1,85	1,95	1,17	33,75

Sumber :Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Padang Lawas, Tahun 2023

Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian Perkembangan bidang Pemuda dan Olah raga dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	81	100	100	90,96	60,53
2	Persentase wirausaha muda	-	-	-	69,44	59,51
3	Cakupan pembinaan Olahraga	-	4	4	-	5
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	2	5	5	23	44
5	Cakupan pembinaan atlet muda	2	-	-	-	5
6	Jumlah atlet berprestasi	5	5	5	35	43
7	Jumlah prestasi Olahraga	-	-	-	4	0

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Statistik

Penyelenggaraan kegiatan statistik daerah selalu rutin dilaksanakan dalam rangka mendukung kebutuhan data-data sebagai informasi dalam

pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Produk-produk buku statistik disusun bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan yang sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2016-2020 adalah Buku Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Statistik Daerah, Buku Indeks Pembangunan Manusia, Buku Statistik Tenaga Kerja, BukuIndikator Gender, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Buku Statistik Penggunaan Lahan Sawah, Buku Analisis Hasil Listing Sensus Ekonomi, Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lain, Buku Indeks Harga Konsumen, Buku Statistik Tanaman Padi dan Palawija, dan BukuPotret Usaha Pertanian Menurut Sub Sektor.

Persandian

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) di Kabupaten Padang Lawas belum berjalan optimal, untuk itu pada RKPD yang baru ini akan dioptimalkan sehingga Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dapat berjalan.

Kebudayaan

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. Beberapa indikator capaian urusan kebudayaan di Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami peningkatan dari 3 cagar budaya pada tahun 2018 menjadi cagar budaya di tahun 2021 sebesar 5 cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	10	10	10
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Perpustakaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan atas

pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut penelitian *UNESCO*, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan *World Bank* dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement,* skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca Provinsi Sumatera Utara berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk Provinsi Sumatera Utara hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasikan buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Kabupaten Padang Lawas yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan minat baca yang juga relatif rendah, hal ini dapat dilihat dengan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan pertahun sebesar 69,457 orang pada tahun 2018 menjadi 4,896 orang pada tahun 2022. Indikator urusan bidang perpustakaan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	69,457	180,078	1,912	4,672	4,896
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	5,742	6,656	6,718	6,729	6,729
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (%)	1,90%	1,98%	2,59%	0,42%	0,40%
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/thn (Orang)	5,788	16,124	191	389	408
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (examplar)	20,346	24,083	27,157	27,281	27,281

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Kearsipan

Penyelamatan arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip dari orang yang tidak berhak, agar arsip tidak rusak atau hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya nilai guna arsip, sehingga tidak dapat disimpan secara berkelanjutan sebagai arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis.

Penambahan khasanah arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip statis diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan, sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa. Dengan penyerahan arsip statis dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan, berarti bahwa tanggungjawab dan hak pengelolaan arsip statis akan berpindah dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan. Hal ini juga berarti akan mengurangi volume arsip yang semakin meningkat di setiap OPD. Itulah sebabnya manajemen kearsipan harus diterapkan agar tidak terjadi penumpukan arsip di tiap OPD. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahanjumlah lain beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni Belum optimalnya penataan tertib arsip, dan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Kearsipan.

Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Padang Lawas cukup banyak namun pemerintah daerah belum mengembangkannya secara optimal. Untuk itu pada periode RKPD ini kepariwisataan akan lebih dikembangkan.

Tabel 2.35
Potensi Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

No	Potensi	Kecamatan
1	Gong Liang Namuap	Ulu Soa
2	Pemandian Aek Milas	Ulu Barumun
3	Pemandian Aek Siraisan	Ulu Barumun
4	Danau Gayambang (Cekdam)	Sosa
5	Air Terjun Sipatabung	Batang Lubu Sutam
6	Batu Naduan Pengapit Sungai	Lubuk Barumun
7	Paya Agung/Tempat Pemandian	Ulu sosa
8	Danau Sosopan	Sosopan
9	Paya loging	Ulu Sosa
10	Sampuran Soniasa	Ulu Sosa
11	Air Terjun Katobung	Batang Lubu Sutam
12	Pemandian Aek Lakkut	Sosa Julu
13	Pertanian Berbasis Teknologi (Dewi Tani)	Aek Nabara Barumun
14	Danau Buaton	Hutaraja Tinggi
15	Air Terjun Sampuran	Batang Lubu Sutam
16	Candi Sipamutung	Barumun Tengah
17	Air Terjun Sihiuk	Lubuk Barumun
18	Aek Hapung	Ulu Sosa
19	Candi Sangkilon	Lubuk Barumun
21	Candi Nagasaribu/Tandihat I,II,III	Barumun Tengah
22	Makam Ompung Permata Sapihak	Barumun Baru
23	Bagas Godang	Barumun Baru

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, 2023

Pertanian

Pertanian merupakan sektor primer yang berkembang di Kabupaten Padang Lawas, hal ini dapat dilihat dari Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB yang memiliki nilai sebesar 34,05 persen pada tahun 2018 dan menjadi 35,50 persen pada tahun 2022. Capaian indikator urusan pertanian di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	34,05	34,63	34,73	35,50	35,50
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3,49	3,55	3,59	4,15	4,15
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanamankeras) terhadap PDRB	42,26	43,06	43,58	1,5	1,5
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	37,60	39,73	45,50	45,5	45,5
5	Cakupan bina kelompok petani	16,00	17,91	19,36	19,36	19,36

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Perdagangan dan Perindustrian

Capaian indikator urusan Perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan salah satunya peningkatan pada jumlah pedagang pada tahun 2018 sebanyak 1.369 pedagang pada tahun 2020 menjadi 1.807 pedagang sedangkan pada tahun 2022 jumlah pedagang mengalami penigkatan menjadi 2.209 pedagang. Realisasi indikator urusan perdagangan dan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	63,33	22	15,31	350	350
2	Jumlah perusahaan menurut badan hukum	358	374	400	659	817
3	Jumlah pedagang	1.369	1.695	1.807	1.381	2.209

Sumber : Dinas Koperasi, Peridustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Padang Lawas, Perikanan tangkap mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 177,45 persen n a i k menjadi 180,00 persen pada tahun 2022, sedangkan perikanan budidaya mengalami penurunan dari 5,135,8 budidaya pada tahun 2018 menjadi 4.403,69 budidaya pada tahun 2022. Produksi perikanan tangkapdan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012 - 2021

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Perikanan Tangkap	177,45	94,7	111,82	115,17	180,00
Perikanan Budidaya	5,135,8	3,706	2,898 ,70	3,822,57	4,043,69

Sumber : Dinas Perikanan dan Perternakan, Tahun 2023

Layanan Penunjang Urusan

Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan **J**angka Menengah Daerah (RP**J**MD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode

selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMN serta RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacukepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025.
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024.
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Padang Lawas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018.

Keuangan

Kabupaten Padang Lawas memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Penetapan APBD Kabupaten Padang Lawas selalu tepat dalam waktunya. Tahun 2022 laporan keuangan Kabupaten Padang Lawas terhadap laporan Opini BPK terhadap laporan keuangan mencapai Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian indikator urusan keuangan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	4,17	4,15	4,12	2,98	2,98
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	8,31	9,17	10,03	6,04	6,04
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,8	23	23,1	95,62	95,62
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	11	11	10	86,96	86,96
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	74,04	73,81	73,57	-	-
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	64,050,224,485,81	64,693,789048,49	65,333,619,773,50	98,08	98,08
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	93,96	93,96

Sumber : Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*).

Indeks Profesionalitas Pegawai adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan menggunakan *composite index*. Perhitungan indeks professional pegawai didasarkan pada 4 (empat) komponen yaitu : Kompetensi, Kinerja, Kompensasi (penghasilan), dan Disiplin.Dan mengalami penurunan tahun 2021 hingga tahun 2022 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 8 persen mengalami penurunan, Sedangkan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 8 persen. Selain itu indikator lainnya adalah indeks Profesion, capaian ini mencerminkan bahwa Profesionalitas Pegawai setiap tahunnya meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.40
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Bulan)	±4 Bulan	±4 Bulan	±4 Bulan	20 JP	20 JP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	5%	6%	6%	8%	8%
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	9,00%	12%	10%	8%	8%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	29	32	31	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	151	141	153	157	167
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2350	2526	2478	2481	2572

Sumber : Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SIPD	-	-	100	100	100
2	E-Planing	85,35	90	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pengawasan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingaan masyarakat harus di akomodasikan dalam setiap peraturan perundang undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dari tahun ketahun terus meningkat. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Sekretariat Dewan

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami peningkatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 dapat diketahui.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2024 termasuk didalamnya perkiraan potensi dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

Kondisi Perekonomian

Kondisi Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat “hamper mendekati” resesi pada tahun 2023.Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun2023 ketingkat yang akan tertatih-taih diambang resesi bagi banyak Negara karena dampak kenaikan suku bunga bank central yang meningkat, perang Rusia di Ukrania dan masih pulihnya ekonomi dunia. Pertumbuhan PDB global diperkirakan akan mencapai 1,7 persen yang merupakan laju paling lambat, diluar resesi tahun 2009 dan 2020 dalam tiga dekade. Prospek ekonomi yang suram ini akan semakin menyulitkan pasar dan ekonomi negara berkembang karena mereka berjuang dengan beban utang yang berat, mata uang yang lemah dan pertumbuhan pendapatan serta investasi bisnis yang melambat; yang saat ini diperkirakan berada pada tingkat pertumbuhan tahunan 3,5% untuk dua tahun ke depan, atau berarti kurang dari setengah laju dua dekade terakhir. Laporan Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2022 merosot menjadi 2,7% atau laju paling lambat kedua sejak pertengahan tahun 1970an setelah 2020, karena pembatasan

ketat nol-COVID, gejolak pasar properti dan anjloknya tingkat konsumsi, produksi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan rebound atau membaik menjadi 4,3% pada tahun 2023, tetapi masih 0,9 persen di bawah perkiraan Juni lalu karena parahnya COVID-19 dan melemahnya permintaan eksternal.

Menkeu melanjutkan, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global maupun faktor-faktor domestik. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2023 yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi dari tahun ini yang hanya 2,8% per tahun yakni di tahun 2023 pada tahun depan akan sedikit membaik menjadi 3,0% di tahun 2024. Dilihat dari volume perdagangan dunia diperkirakan juga lebih baik atau pulih, meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi tumbuh 3,5% tahun 2024.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan didukung produk hilirisasi yang terus diperkuat untuk menopang daya saing produk ekspor Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi *agregat demand* juga diperkirakan akan menguat di tahun 2024. Di samping itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian.

Kondisi Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini berada dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makroekonomi, fiscal-moneter, dan sektor keuangan secara umum. Menkeu menyebut bahwa penerimaan negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik. Namun, Menkeu juga mengatakan bahwa Indonesia tetap perlu memiliki kewaspadaan terhadap kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian akibat geopolitik yang belum stabil. Situasi yang tidak pasti ini yang harus menjadi perhatian kita dalam mengidentifikasi risiko terhadap ekonomi kita. Resiko pertama, ekspor tentunya, karena itu adalah source of growth kita Menteri Keuangan menyebut perlunya diversifikasi tujuan negara ekspor untuk tetap mempertahankan kinerja baik ekspor Indonesia yang selama ini pertumbuhannya terjaga. India dan negara-negara di kawasan Timur Tengah bisa menjadi negara tujuan ekspor baru bagi Indonesia. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menkeu mengatakan bahwa konsumsi rumah

tangga memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat. Jika bicara tentang daya beli masyarakat, APBN menjadi shock absorber yang luar biasa, kata Menkeu. Tahun ini Pemerintah telah membelanjakan untuk subsidi kompensasi di atas Rp500 triliun, dan tahun depan alokasi Bansos mencapai Rp470 triliun. Hal ini kata Menkeu ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial terutama kepada kelompok yang rentan.

Pemerintah telah mendesain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada 2024. Salah satunya target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3%-5,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Pemerintah telah mendesain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada 2024. Salah satunya target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3%-5,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Selain pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3% hingga 5,7%, kerangka ekonomi 2022 juga ditetapkan untuk nilai tukar rupiah per US$ sebesar Rp 14.800 - Rp 15.400, serta suku bunga SPN 6,5% hingga 7,4%. Kemudian inflasi 1,5% hingga 3,5%, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) US$ 75 hingga US$ 85 per barrel, lifting minyak sebesar 591.000 hingga 691.000 per barel, dan lifting gas sebesar 1.007.000 hingga 1.058.000 setara minyak per hari. Adapun untuk target pembangunan dalam KEM PPKF pada 2024 ditetapkan untuk rasio kemiskinan 6,5% hingga 7,5%, gini rasio sebesar 0,36 hingga 0,37, serta tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6% sampai 4,3%. Adapun untuk target pembangunan dalam KEM PPKF pada 2024 ditetapkan untuk rasio kemiskinan 6,5% hingga 7,5%, gini rasio sebesar 0,36 hingga 0,37, serta tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6% sampai 4,3%. Ada tujuh sektor di industri sektor manufaktur yang digenjot untuk mengimplementasikan program itu, yakni industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan, dan farmasi. Tujuh industri itu menyumbang 70% PDB industri, 65% ekspor industri, dan 60% tenaga kerja industri Indonesia

3.1.3. Konsidi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Dari segi ekonomi makro perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,26 persen (yoy). Perlambatan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan pertumbuhan ekspor yang menurun sebagai dampak moderasi tren harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara, yakni *Crude Palm Oil* (CPO), dan dampak dari fenomena cuaca ekstrem pada triwulan I 2023 terhadap penurunan kualitas komoditas pertanian seperti kelapa sawit. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap kuat, ditopang oleh

masih kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian, LU perdagangan, dan LU transportasi tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Deselerasi LU Pertanian seiring dengan masuknya periode musim tanam beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah; serta fenomena cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas beberapa komoditas pertanian, termasuk Tandan Buah Segar. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU konstruksi dan LU industri pengolahan seiring dengan percepatan proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan tetap kuatnya permintaan domestik.

Tekanan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 relatif menurun meski masih berada pada level yang cukup tinggi. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 tercatat sebesar 4,80 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,12 persen (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi tersebut, maka inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 masih berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3%±1 persen. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Transportasi serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin, beras, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Peningkatan harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku per tanggal 1 Maret 2023. Seiring dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut komoditas beras ikut meningkat sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi beras. Selain itu, tingginya harga pupuk dan belum meratanya panen di wilayah produksi juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023.

Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2023 juga mengalami peningkatan, didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Peningkatan ini seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara serta pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) dan optimalisasi APBD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2023 tercatat meningkat signifikan, yakni naik 28,81 persen (yoy),

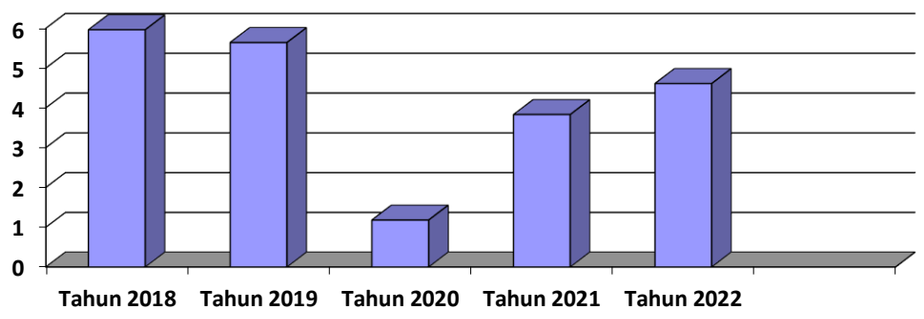
dengan realisasinya pada triwulan I-2023 sebesar 15,71 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022 sebesar 14,22%.

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat, yakni bias atas dalam kisaran 3,9-4,7 persen (yoy). Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tecermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) Pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respons dari ketatnya pasar tenaga kerja; ii) Risiko dampak El Nino yang diprakirakan mencapai puncaknya pada Juli-September 2023 terhadap gangguan produksi pangan dan risiko terkait kecukupan pasokan komoditas pangan impor seiring dengan belum optimalnya realisasi impor; serta iii) Ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Diharapkan untuk tahun 2024 hal-hal yang menjadi penghambat perkonomian sumatera utara dapat terselesaikan dan perekonomian sumatera utara semakin kuat dan tumbuh dengan cepat dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,00 persen. Selain itu, tahun 2024 Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tentunya akan mendorong perekonomian Sumatera Utara lebih menguat lagi.

3.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.586.764.409,71 dan PDRB per kapita mencapai Rp 54,58 juta. Ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 sebesar 4,61 persen. Laju Pertumbuhan PDRB dapat dilihat dari Grafik berikut ini:

Gambar 3.1
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas, 2023

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Menurut lapangan usaha PDRB atas dasar harga konstan ditunjukan dengan nilai ditahun 2018 sebesar Rp. 3.922,76 juta sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp. 4.724.62 juta hal ini menunjukkan sektor ini terus mengalami kenaikan. sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2018 sebesar Rp. 4.956,10 juta dan tahun 2022 sebesar Rp. 7.338,87 juta dan sama hal nya terus meningkat dari tahun ketahun, sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi dan industri pengolahan juga memiliki nilai konstribusi yang cukup besar dan lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 3.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 - 2022
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	3.922,76	5,45	4.122,57	5,09	4.264,91	3,45	4.494,70	5,39	4.724,62	5,12
2	Pertambangan & penggalian	40,07	8,59	43,17	7,74	42,48	-1,59	44,1	3,78	47,74	8,28
3	Industri pengolahan	1.087,00	6,32	1.155,32	6,29	1.167,50	1,05	1.196,36	2,47	1.241,14	3,74
4	Pengadaan Listrik dan gas	20,13	6,34	21,28	5,67	23,15	8,82	24	3,67	25,04	4,34
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-	-	1,12	-	0,13	3,02
6	Konstruksi	1.157,45	7,57	1.241,94	7,3	1.177,64	-5,18	1.198,51	1,77	1.247,95	4,12
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	504,54	5,61	528,63	4,77	526,76	-0,35	541,85	2,68	565,42	4,35
8	Trasportasi dan pergudangan	92,02	6,07	97,29	5,73	88,99	-8,53	91,95	3,33	96,58	5,04
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	79,49	7,39	84,30	6,05	83,70	-0,7	84,62	1,1	88,10	4,11
10	Informasi dan komunikasi	54,59	8,21	58,74	7,6	64,14	9,19	67,80	5,7	71,42	5,35
11	Jasa keuangan dan asuransi	58,45	1,24	59,33	1,5	59,77	0,75	63,35	5,98	66,53	5,03
12	Real estate	223,47	5,36	234,73	5,03	243,43	3,71	243,72	0,12	251,76	3,30
13	Jasa perusahaan	3,93	4,83	4,11	4,43	4,05	-1,55	4,00	-1,03	4,10	2,50

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	217,51	6,12	231,29	6,34	230,11	-0,51	229,70	-0,18	251,63	3,02
15	Jasa pendidikan	29,96	6	31,49	5,13	32,15	2,1	33,16	3,13	34,19	3,10
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	40,56	5,37	42,66	5,17	42,25	-0,96	41,61	-1,52	43,90	5,50
17	Jasa lainya	2,36	4,92	2,47	4,95	2,46	0,62	2,60	5,83	2,71	4,30
PDRB Kabupaten Padang Lawas		7.534,30	5,96	7.959,31	5,64	8.053,50	1,18	8.362,13	3,83	8.747,96	4,61
PDRB Provinsi Sumatera Utara		512.762,63	5,18	539.513,85	5,22	533.746,36	-1,07	547.651,82	2,61	573.528,77	4,73

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	4.956,10	46,77	5.249,98	46,17	5.712,49	47,62	6.502,57	49,49	7.338,87	50,31
2	Pertambangan & penggalian	55,9	0,53	61,12	0,54	61,71	0,51	64,4	0,49	71,98	0,49
3	Industri pengolahan	1.818,25	17,16	1.969,80	17,32	2 .100,77	17,51	2.296,56	17,48	2.526,54	17,32
4	Pengadaan Listrik dan gas	20,86	0,2	22,14	0,19	24,11	0,20	25,17	0,19	26,3	0,18
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-	-	0,14	-	0,14	-
6	Konstruksi	1.763,00	16,64	1.953,26	17,18	1.915,11	15,96	1.980,76	15,08	2.191,99	15,03
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	768,92	7,26	815,02	7,17	844,52	7,04	889,9	6,77	949,29	6,51
8	Trasportasi dan pergudangan	136,92	1,29	147,44	1,3	139,76	1,16	148,98	1,13	165,34	1,13
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	115,04	1,09	123,79	1,09	124,12	1,03	125,79	0,96	133,28	0,91
10	Informasi dan komunikasi	60,88	0,57	66,68	0,59	74,26	0,62	80,44	0,61	86,3	0,59
11	Jasa keuangan dan asuransi	92,35	0,87	93,75	0,82	94,1	0,78	104,1	0,79	112,47	0,77
12	Real estate	393,89	3,72	433,38	3,71	447,38	0,73	460,15	3,5	502,62	3,45
13	Jasa perusahaan	6,18	0,06	6,63	0,06	6,88	0,06	6,94	0,05	7,27	0,05
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	311,7	2,94	335,85	2,95	343,6	2,86	342,8	2,61	353,85	2,43
15	Jasa pendidikan	40,28	0,38	43,45	0,38	45,68	0,38	47,28	0,36	49,31	0,34
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	51,78	0,49	56,51	0,5	58,89	0,49	58,64	0,45	66,26	0,45
17	Jasa lainnya	3,84	0,04	4,19	0,04	4,26	0,04	4,53	0,03	4,95	0,03
PDRB Kabupaten Padang Lawas		10.595,87	100,01	11.371,99	100,01	11.997,10	0,00	13.139,14	99,99	14.586,76	99,99
PDRB Provinsi Sumatera Utara		741.347,43	100	799.608,95	100	811.188,31	100	859.934,26	100	955.193,09	100

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023
PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami kenaikan signifikan. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan nilai positif seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:

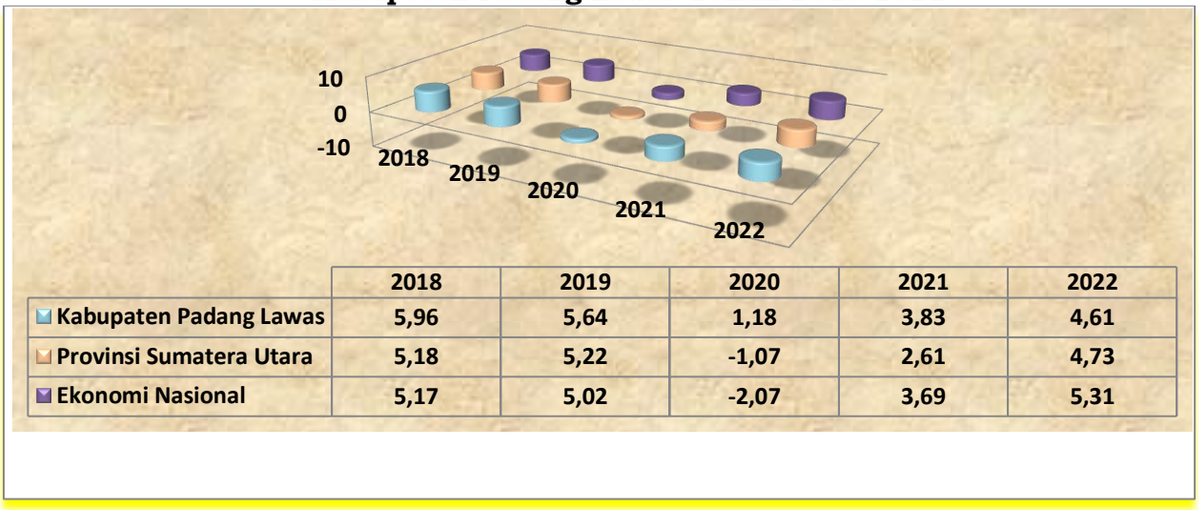
Tebel 3.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Tahun 2022
Kota Padangsidimpuan	4,77
Kabupaten Tapanuli Selatan	4,78
Kabupaten Mandailing Natal	4,34
Kabupaten Padang Lawas Utara	4,12
Kota Sibolga	4,15
Kabupaten Tapanuli Tengah	4,18
Kabupaten Padang Lawas	4,61
Provinsi Sumatera Utara	4,73
Nasional	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus mengalami Fluktuasi, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas yang terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 1,18 persen, sedangkan yang tertinggi terjadi pada 2018 sebesar 5,96 persen. Hal serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dimana pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar -1,07 persen, dan yang tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 5,22 persen, dan pada pertumbuhan ekonomi Nasional yang terendah terjadi pada tahun 2020 yakni dengan nilai sebesar -2,07 persen sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen di lihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Padang Lawas	5,96	5,64	1,18	3,83	4,61
Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Ekonomi Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Proyeksi Perekonomian Kabupaten Padang Lawas

Perkembangan perekonomian Kabupaten Padang Lawas diperkirakan meningkat seiring dengan terus berlangsungnya program atau kegiatan vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Harga dan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan akan mengalami akselerasi yang sejalan dengan kondusifnya kegiatan dan kebutuhan komoditi bidang industri pengolahan terkait, konstruksi dan industri pengolahan juga akan terus mengalami perkembangan. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik.

Sebagai bahan pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut::

1. Berdasarkan analisis dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional diperkirakan akan semakin meningkat hingga tahun 2023 sebesar 6,0 persen, dengan memperhatikan aspek dan fakor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan sebesar 3,0 persen yakni membaik dibandingkan tahun 2023 yang dianggap lemah;
2. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2022 tercatat sebesar 4,50-5,50 persen. Sedangkan di Triwulan III Menurut BPS SUMUT pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ditahun 2021 sebesar 3,67 persen (yoy).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meyakini ekonomi provinsinya tidak akan mengalami resesi pada 2023. Ekonomi Sumut diperkirakan tetap bertumbuh dengan ditopang ekspor komoditas pertanian, seperti minyak sawit mentah, karet, dan kopi. Meski demikian, Edy mewanti-wanti kekurangan pasokan pangan, buruknya kualitas infrastruktur, dan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Sumut. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Ibrahim, mengatakan bahwa potensi penguatan ekonomi Sumut di tahun 2023 masih berlanjut. BI Sumut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumut di tahun 2023 berada di kisaran 3,9 hingga 4,7 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Amich Alhumami menyampaikan, pokok pikiran pembangunan Provinsi Sumut. Untuk rancangan awal indikator makro daerah pada 2024, laju pertumbuhan ekonomi berkisar 5,2 – 5,5%, indeks pembangunan manusia (IPM) diperkirakan 73,33 – 73,67 dan tingkat kemiskinan 6,50 – 7,00%.

Tahun 2021 dan 2022 sejalan dengan program vaksinasi, maka di tahun 2023 dan 2024 konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga, dan peningkatan Ekspor berbagai komoditi. Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun sebelumnya akan mendorong perbaikan investasi.

Dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Kabupaten Padang Lawas mengarah pada antara lain:

1. Penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Penguatan industri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan *event-event* wisata dan

budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk lokal UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk lokal UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia dan pengembangan pelaku UMKM dan IKM;

4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis dan;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi.

Arah Kebijakan Ekonomi

Upaya akselerasi transformasi ekonomi membutuhkan laju pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di sisi lain faktor risiko tetap akan diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menghambat upaya tersebut. Potensi stagflasi dampak lonjakan inflasi global akibat supply disruption yang semakin diperburuk tensi geopolitik menjadi risiko perekonomian yang harus diwaspadai. Risiko global juga berkembang pada krisis utang global akibat meningkatnya cost of fund juga memberikan tekanan terhadap depresiasi nilai tukar mengakibatkan arus modal yang keluar dari negara berkembang.

Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (gini ratio) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,5-8,5 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 4,61persen tercatat mengalami kenaikan signifikan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas masih lebih baik dari beberapa Kabupaten/Kota lain di Wilayah Pantai Barat.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Padang Lawas disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang

direncanakan. Pesatnya peningkatan pertumbuhannya sejalan dengan peningkatan kebutuhan pertemuan serta penyelesaian pekerjaan maupun tugas-tugas sekolah secara virtual.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila tingkat inflasi di daerah tinggi, karena peningkatan pendapatan masyarakat dirasakan lebih rendah dari kenaikan harga barang dan jasa di pasar.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer yang menjadi andalan Kabupaten Padang Lawas. Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional yang harus bersinergi, linier dan terintegrasi. Sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024, maka kebijakan ekonomi daerah disusun dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat berjalan selaras dan sinergis. Agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dengan sasaran yang akan diwujudkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan; dan Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksin yang telah meluas, peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan sedangkan sektor lain yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi dan stabilitas makro ekonomi terjaga yang tercermin dari tingkat inflasi rendah, nilai tukar rupiah terjaga dan defisit transaksi berjalan yang aman. Peran pemerintah dibutuhkan untuk

mengakselerasi proses pemulihan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan ekonomi tahun 2023 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing, sedangkan strategi kebijakan diarahkan untuk tidak hanya kembali ke tingkat sebelum krisis tetapi dapat tumbuh lebih baik.

Tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 “Akselarasi Pencapaian Kabupaten Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Ekonomi. Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Masyarakat dalam Pencapaian Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang Bercahaya” Searah dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya) khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan sekaligus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, juga mendukung sektor pertanian dan usaha tani, menekan inflasi, dan mendukung penuh produk dalam daerah. Pemulihan ekonomi terutama terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Padang Lawas, sehingga para pelaku usaha akan mampu bertahan, dan dapat bangkit berproduksi kembali di Masa dan Pasca Pandemi Covid 19 dengan menyusun kegiatan yang mendukung pemulihaan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga akan berusaha dalam meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata dengan cara membangun wahana wisata baru yang spektakuler dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata agar lebih menarik, sehingga akan banyak wisatawan baik dari lokal maupun dari luar untuk berkunjung, Kabupaten Padang Lawas melalui even-even mempromosikan potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Padang Lawas seperti produk unggulan pariwisata, perikanan, pertanian dan kehutanan. Dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan dapat menggerakan kembali roda perekonomian masyarakat, meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas akan berkurang.

Tantangan dan Prospek Ekonomi Global

Untuk pertama kalinya sejak great depression atau depresi besar (1929–1932), ekonomi serta negara-negara maju dan negara berkembang, juga negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (emerging market), berada dalam situasi yang sama, yakni menghadapi resesi atau kelesuan ekonomi. Proyeksi ini dipengaruhi kondisi dunia yang dikepung pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak negara mengalami multi-krisis, antara lain kesehatan, keuangan, dan harga komoditas yang anjlok. Kondisi ini kemudian menimbulkan situasi yang kompleks.

Menurut Bank Dunia pertumbuhan ekonomi masih melambat hingga tahun 2023, ditengah ancaman dari varian baru Covid-19 serta kenaikan inflasi, tingkat utang dan ketimpangan pendapatan. Menurut Laporan Global Ekonomoc Prospects terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global di perkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023 Bank Dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut. Pesatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Perang di Ukraina dan sanksi Barat terhadap Rusia memicu ketegangan geopolitik, membuat harga energi dan pangan melonjak melampaui level yang belum pernah ada sebelumnya, dan mengganggu rantai pasokan, yang membuat pemulihan ekonomi global menjadi sangat sulit.

Ketika inflasi naik ke level tertinggi selama bertahun-tahun, bank sentral terpaksa memperketat aliran uang dengan menaikkan suku bunga dalam menghadapi ekonomi yang sudah melambat, yang selanjutnya meningkatkan prospek resesi tahun 2023 namun, resesi hanyalah salah satu kesulitan ekonomi yang menanti semuanya pada tahun ini. Berikut adalah beberapa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi ekonomi global yaitu : Resesi global, inflasi, dan kekacauan akibat pandemi Covid-19.

Perlambatan tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan turun dari 5 persen pada 2021 menjadi 3,8 persen pada 2022 dan 2,3 persen pada 2023. pertumbuhan ini diperkirakan cukup untuk memulihkan output dan investasi ke tren pra-pandemi di negara-negara ini. Namun, di negara-negara

berkembang, diperkirakan akan turun dari 6,3 persen pada tahun 2021 menjadi 4,6 persen pada tahun 2022 dan 4,4 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, semua ekonomi maju akan mencapai pemulihan output penuh; namun output di negara berkembang akan berada 4 persen di bawah level pra-pandemi. Bagi banyak ekonomi yang rentan, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan akan terasa lebih besar. Perekonomian negara yang terdampak konflik diperkirakan lebih rendah 7,5 persen dari level pra-pandemi, sedangkan di negara-negara kepulaian diproyeksikan lebih rendah 8,5 persen. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan tekanan inflasi yang sangat memukul pekerja berpenghasilan rendah akan menghambat kebijakan moneter. Secara global dan di negara maju, inflasi berjalan pada level tertinggi sejak 2008. Di negara berkembang, inflasi telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2011. Banyak negara berkembang menarik dukungan kebijakan untuk menahan tekanan inflasi, padahal laju pemulihan ekonomi belum selesai.

Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional

Setelah Covid-19 memberikan dampak terhadap tekanan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Tantangan yang perlu diwaspadai pada tahun yang akan datang dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional adalah:

1. Perlambatan Ekonomu Dunia

   Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga optimisme namun pada saat yang sama tetap waspada yang sangat tinggi. Untuk itu APBN akan terus kita jaga untuk terus bisa menjaga dari sisi demand, supply, namun APBN sendiri juga harus makin kuat, makin sehat. Sementara kerjasama antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diintensifkan karena tantangan memang bergeser kepada sektor keuangan, dan juga untuk belanja kesehatan. IMF hanya memberi catatan bahwa selama setahun ke depan negara-negara perlu mewaspadai Hal itu karena tahun 2023 dikatakan Menkeu memiliki tantangan ekonomi yang berbeda dari tahun sebelumnya, terutama kendala dari sisi supply akibat dampak pandemi maupun karena terjadinya perang dan geopolitik, sementara dari sisi demandnya terus bertambah sehingga meyebabkan kompleksitas.

2. Pertumbuhan Ekonomi

   Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga optimisme namun pada saat yang sama tetap waspada yang sangat tinggi.

   “Untuk itu APBN akan terus kita jaga untuk terus bisa menjaga dari sisi demand, supply, namun APBN sendiri juga harus makin kuat, makin sehat. Sementara kerjasama antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diintensifkan karena tantangan memang bergeser kepada sektor keuangan. Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga optimisme namun pada saat yang sama tetap waspada yang sangat tinggi. Untuk itu APBN akan terus kita jaga untuk terus bisa menjaga dari sisi demand, supply, namun APBN sendiri juga harus makin kuat, makin sehat. Sementara kerjasama antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diintensifkan karena tantangan memang bergeser kepada sektor keuangan, dan juga untuk belanja kesehatan.

3. Defisit Transaksi semakin Meningkat

   Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat Transaksi berjalan mengalami defisit terlalu tinggi akan membutuhkan transaksi finansial yang tinggi. Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara pers sudah mencatatkan surplus. Jika tidak mencukupi maka simpanan yang ada di cadangan devisa akan terpakai. Dengan kondisi itu berarti rupiah akan mengalami tekanan karena kebutuhan dollar AS yang meningkat. Dengan demikian Indonesia akan membutuhkan aliran modal asing untuk masuk lebih banyak baik melalui investasi maupun penjualan surat berharga atau utang luar negeri.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

   Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Untuk kasus di tanah air, ada lima tantangan dalam investasi digital ekonomi di Indonesia saat ini yaitu : cyber securyty, persaingan yang semakin ketat, pembangunan SDM, ketersediaan akses internet yang mempuni dan regulasi mengikuti perkembangan zaman.

Di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa yang akan datang, namun Indonesia masih memiliki prospek dalam mendorong pertumbuhan ekonominya di masa yang akan datang.

1. Indonesia berpeluang keluar dari krisis

   Berbagai babak krisis ekonomi maupun kemelut sosial politik telah mewarnai pembangunan negeri ini, termasuk krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak situasi politik dunia. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia membuktikan mampu melewati seluruhnya dengan baik. Ke depan, tetap diperlukan kewaspadaan yang tinggi agar Indonesia tetap mampu mempertahankan kemandirian dan kedaulatannya.

2. Domestik masih terjaga

   Permintaan dalam negeri (domestik) Indonesia juga disebut akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi, mendorong meningkatnya kelompok kelas menengah, yaitu kelompok yang memiliki pengeluaran (belanja) $2 - $20 per kapita perhari. Keseluruhannya adalah menjaga permintaan dalam negeri tetap tumbuh dan roda perekonomian masih tetap berjalan. Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat terkontraksi di Triwulan III-2021 telah berhasil rebound dengan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021. Prospek ke depan juga memperhatikan perkembangan harga komoditas, baik energi maupun non-energi. Peningkatan harga komoditas pertambangan di 2021 diharapkan masih berlanjut di 2022, sehingga akan mendorong produktivitas sektor pertambangan, yang berdampak bagus untuk daerah yang berbasis tambang. Hilirisasi produk-produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, misalkan produk turunan nikel, masih menjadi prioritas. Proses hilirisasi ini ditopang juga oleh pembangunan pabrik smelter dan perusahaan baterai yang mendorong kolaborasi BUMN dengan investor domestik dan/atau internasional.

3. Belanja pemerintah yang terfokus

   Pemerintah semakin serius untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk tahun kedepannya pemerintah berfokus kepada stunting, pemilu kepala daerah, energi dan pangan. Tambahan belanja pemerintah memang sudah sepantasnya untuk dilakukan.

4. Inflasi

   Inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibanding bulan Desember 2022 yang sebesar 5,51 persen (yoy). Pemerintah menggunakan APBN dan instrumen fiskal untuk mengelola inflasi agar berada dalam batas yang moderat.

Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih ekonomi Kabupaten Padang Lawas yang sudah semakin terbuka dimana PDRB Kabupaten Padang Lawas yang semakin meningkat. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam perekonomian global, nasional maupun tingkat provinsi akan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian khususnya di Kabupaten Padang Lawas.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut, Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas terkait aktifitas ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan antar Wilayah di Kabupaten Padang Lawas;
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi;
3. Pergerakan inflasi;
4. Realisasi APBD cenderung mencapai puncaknya pada akhir tahun sehingga berdampak pada siklus fiskal yang procyclical terhadap perekonomian;
5. Meningkatnya perekonomian masyarakat, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan;
6. Sarana prasarana infrastruktur yang layak dan merata menjadi pendukung untuk masyarakat mendapatkan seluruh akses pelayanan publik dan juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
7. Perbaikan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan *stakeholders;*
8. penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian.

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan kesehatan lainnya dan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 – 2024

Indikator	Realisasi 2022	Proyeksi 2023*	Proyeksi 2024*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	4,00-4,50	6,75
PDRB perkapita ADHK (Rp juta)	32 730 179,31	34 636 039,11	36 719 348,05
PDRB perkapita ADHB (Rp Juta)	54 575 865,34	55 765 661,14	56 253 015,68
Inflasi (%)	6,10	6,72	6,85
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,90	3,25-3,50	4,90-5,20
Persentase Kemiskinan (%)	8,05	8,30-8,50	7,25-7,50
Gini Ratio (poin)	0,227	0,2185	0,1980
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	69,58	68,80-70,00	68,65-70,30

Sumber : BPS Padang Lawas, 2023
BPS SUMUT, 2023

Dari data diatas maka arah kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun Kabupaten Padang Lawas antra lain:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan sektor industri melalui penguatan produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan kemampuan dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor ekonomi kreatif melalui pelaksanaan pojok UMKM dan IKM; penguatan mutu dan standarisasi produk ekonomi kreatif; Mempromosikan produk-produk unggulan UMKM, Memberikan bantuan

berupa sarpras perdagangan, serta penguatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif;

4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Menjalin sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas; dan
6. Sinergitas semua OPD untuk melakukan perubahan dalam mencapai perekonomian masyarakat yang sejahtera, malakukan pembinaan terhadap UMKM/IKM, pembinaan terhadap tenaga kerja, sarana dan prasarana yang mendukung melalui program dan kegiatan, termasuk sinergitas sampai dengan kecamatan, kelurahan dan desa.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja *(perfomance based budgeting)* dan money follow program serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability)* yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, DAK maupun DID dan Dana Desa yang merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Padang Lawas dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan

daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini tentu sajaharus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR). Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Padang Lawas berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dantepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untukkemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.036.704.391.445,00**	**1.065.364.038.277,00**	**1.028.027.894.699,09**	**1.089.721.578.253,00**	**1.128.122.508.129,00**	**2,76**	**(3,50)**	**6,00**	**3,40**
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	47.501.937.457,00	6,14	18,50	58,55	(84,93)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.058.939.820.672,00	35,82	(,82)	3,01	5,39
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	21.680.750.000	(85,97)	(100,00)	0,00	100,00
5	**BELANJA**	**1.035.264.004.096,00**	**1.076.597.652.225,00**	**1.053.281.447.741,00**	**1.124.661.780.131,00**	**1.137.014.106.124,00**	**3,99**	**(2,17)**	**6,78**	**1,09**
5,1	BELANJA OPERASI	582.197.337.553,00	633.728.776.587,00	630.470.986.646,00	685.795.447.416,00	721.007.988.227,00	8,85	(,51)	8,78	4,89
5,2	BELANJA MODAL	143.366.541.800,00	145.733.333.116,00	134.826.465.820,00	146.504.332.112,00	118.913.101.554,00	1,65	(7,48)	8,66	(23,20)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	4.267.313.878,00	(80,46)	37,53	(21,72)	31,08
5,4	BELANJA TRANSFER	295.716.184.597,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	289.421.110.465,00	292.825.702.465,00	(0,44)	(3,46)	1,83	1,16
	Total Surplus/(Defisit)	**1.440.387.349,00**	**(11.233.613.948,00)**	**(25.253.553.041,91)**	**(34.940.201.878,00)**	**(8.891.597.995,00)**	**(879,90)**	**124,80**	**38,36**	**(292,96)**
6	**PEMBIAYAAN**	**45.698.121.224,00**	**47.138.508.565,00**	**34.145.151.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,55**	**3,15**	**(27,56)**	**2,33**	**(292,96)**
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.787.358.551,00	-	-	-	0,00	(100,00)	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	**45.698.121.224,00**	**45.351.150.014,00**	**34.127.691.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,55**	**(0,76)**	**(24,75)**	**2,38**	**(292,96)**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		47.138.508.565,00	34.117.536.066,36	8.891.597.995,45	-	-	(27,62)	(73,94)	(100,00)	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penentuan kinerja pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan.

Tabel 3.6
Pertumbuhan Pendapatan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2022

Uraian	Realisasi			Rata-Rata Persentase Pertumbuhan
	2020	2021	2022	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,04	55.408.021.053,09	8,21
PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	11,67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	0,00	(61,99)
JUMLAH	***1.036.704.391.445,00***	**1.065.364.038.277,04**	**1.028.045.354.699,09**	**(0,25)**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 begitu juga dengan Pendapatan Transfer, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan. Pendapatan mendasari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Terhadap hal tersebut belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu adanya penyesuaian. Adapun deviasi target pendapatan dengan realisasi, lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal di luar RKPD Kabupaten Padang Lawas, seperti kenaikan dan/atau penurunan dana perimbangan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan DID serta penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari dana hibah maupun dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu lagi dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : 1) Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU serta Dana Transfer Khusus yaitu DAK fisik dan DAK non fisik), 2)Dana Insentif Daerah (DID) dan 3) dana desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi : hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan sumberdaya dan daya mampu daerah;
2. kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;

4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; RKPD Kabupaten Padang Lawas;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan
7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023, meliputi :

1. Peningkatan PAD, dengan upaya :
   a. Mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
      1) Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
      2) Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukungdengan pemanfaatan teknologi informasi;
      3) Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek-objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya;
      4) Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif;
      5) Melakukan Pemasangan Stiker Belum Bayar Pajak sebagai sanksi moral kepada wajib pajak;
      6) Melakukan pemantauan secara “open” maupun “silent” untuk mengetahui kesesuaian antara laporan dalam SPTPD yang disampaikan dengan fakta riil di lapangan;
      7) Melakukan pendekatan secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;
      8) Melakukan kerjasama dengan Satpol PP sebagai penegak Perda dalam berbagai kegiatan optimalisasi pemungutan pajak;
      9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan semua *stakeholder* terkait ketentuan perpajakan;
      10) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah;

11) Secara bertahap melakukan peninjauan NJOP Reklame dan NJOP PBB-P2; dan
12) Memberikan reward melalui Gebyar Hadiah Pelunasan PBB P2 baik bagi wajib pajak maupun aparat pemungut tingkat RKPD Kabupaten Padang Lawas desa/kelurahan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan aparat pemungut tingkat desa/kelurahan.

b. Mengoptimalkan pendapatan Retribusi Daerah dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain :
   1) Menggali sumber-sumber retribusi daerah dengan memperluas pelayanan;
   2) Meninjau tarif retribusi yang pengenaan tarifnya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
   3) Mengintensifkan pemungutan retribusi daerah melalui penerapan e-retribusi; dan
   4) Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang.

c. Meningkatkan pendapatan dari Kekayaan Daerah yang di pisahkan dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
   1) Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
   2) Meningkatkan penyertaan modal secara selektif agar BUMD dapat melakukan ekspansi usahanya dan memberikan kontribusi yang optimal.

d. Mengoptimalkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1) Mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah yang idle melalui kerjasama atau bentuk perikatan lainnya;
   2) Mengoptimalkan tagihan daerah baik Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
   3) Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan; dan
   4) Melakukan investasi jangka pendek atas idle kas.

2. Meningkatkan penerimaan Dana Tranfer dengan upaya :
   Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah

yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, insentif daerah, dana desa) dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan).

3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan upaya :

   Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan RKPD Kabupaten Padang Lawas perundang-undangan.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian objek penerimaan Beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kebijakan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah kebijakan dalam kerangka APBD Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.036.704.391.445,44	1.065.364.038.277,04	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.128.122.508.129	2,76	(3,50)	6,00	3,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	44.055.621.274,44	46.759.609.982,04	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	47.501.937.457,00	6,14	18,50	58,55	(84,93)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	12.861.852.315,11	13.217.341.379,80	21.424.802.112,00	44.831.506.844,00	32.797.831.148,00	2,76	62,10	109,25	(36,69)
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.467.318.627,00	3.257.490.666,00	14.688.479.262,00	9.864.020.884,00	2.950.964.000,00	32,03	350,91	(32,85)	(234,26)
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.347.617.748,00	5.074.401.622,00	3.958.461.193,13	7.000.000.000,00	3.958.461.193,00	116,15	(21,99)	76,84	(76,83)
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	26.378.832.584,33	25.210.376.314,24	15.336.278.485,96	26.154.009.116,00	7.794.681.116,00	(4,43)	(39,17)	70,54	(235,54)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.058.939.820.672,00	35,82	(0,82)	3,01	5,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	682.838.699.920,00	939.067.861.605,00	923.813.984.840,00	963.979.874.000,00	1.013.660.439.000,00	37,52	(1,62)	4,35	4,90
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	39.189.934.251,00	41.566.393.690,00	48.805.888.806,00	37.892.167.409,00	45.279.381.672,00	6,06	17,42	(22,36)	16,31
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	21.680.750.000,00	(85,97)	(100,00)	0,00	100,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	21.680.750.000,00	(85,97)	(100,00)	0,00	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah sesuai dengan kapasitas kemampuan pendanaan akan memperhatikan kebijakan belanja untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat sebagai berikut:

1. Alokasi belanja Prioritas RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang merupakan Tahun kelima difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya) khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Alokasi belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
3. Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji;
4. Penerimaan dari pajak daerah retribusi daerah akan di alokasikan kembali ke desa sebesar 10 persen;
5. Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastuktur publik;
6. Pengalokasian anggaran dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.;
7. Pengalokasian anggaran Tahun 2024 disisihkan untuk anggaran kebutuhan dana pemilu.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2032	2024
5	**BELANJA**	**1.035.264.004.104,00**	**1.076.597.652.225,00**	**1.053.281.447.741,00**	**1.124.661.780.131,00**	**1.137.014.106.124,00**	**3,99**	**(2,17)**	**18.38**	**1,09**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**582.197.337.553,00**	**633.728.776.587,00**	**630.470.986.646,00**	**685.795.447.416,00**	**721.007.988.227,00**	**8,85**	**(0,51)**	**18.36**	**4,89**
5.1.01	Belanja Pegawai	365.904.697.961,00	336.613.956.837,00	351.057.657.291,00	385.635.990.081,00	442.955.113.418,00	(8,01)	4,29	20.23	12,94
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.908.800.677,00	239.912.143.070,00	262.234.172.820,00	281.863.618.420,00	217.013.097.042,00	20,01	9,30	11.39	(29,88)
5.1.05	Belanja Hibah	13.531.958.915,00	54.604.544.680,00	12.745.716.535,00	15.078.338.915,00	58.849.078.915,00	303,52	(76,66)	07.13	74,38
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.851.880.000,00	2.598.132.000,00	4.433.440.000,00	3.217.500.000,00	2.190.698.852,00	(8,90)	70,64	(27,43)	(76,87)
5,2	**BELANJA MODAL**	**143.366.541.808,00**	**145.733.333.116,00**	**134.826.465.820,00**	**146.504.332.112,00**	**118.913.101.554,00**	**1,65**	**(7,48)**	**15.52**	**(23,20)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	3.106.646.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.463.521.001,00	18.640.357.443,00	16.231.502.731,00	26.508.065.010,00	22.922.336.600,00	(73,17)	(12,92)	07.29	(15,65)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.982.874.265,00	53.492.045.002,00	56.280.047.562,00	52.475.533.749,00	16.338.550.000,00	181,79	5,21	(6,76)	(221,18)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.848.553.219,00	70.489.284.671,00	62.287.840.527,00	63.835.502.353,00	68.999.061.954,00	38,63	(11,64)	11.37	7,48
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.071.593.323,00	5.000.000,00	27.075.000,00	3.685.231.000,00	10.653.153.000,00	(99,88)	441,50	04.40	65,41
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.983.940.146,00**	**2.731.885.932,00**	**3.757.058.103,00**	**2.940.890.138,00**	**4.267.313.878,00**	**(80,46)**	**37,53**	**(21,72)**	**31,08**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	4.267.313.878,00	(80,46)	37,53	(21,72)	31,08
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**295.716.184.597,00**	**294.403.656.590,00**	**284.226.937.172,00**	**289.421.110.465,00**	**292.825.702.465,00**	**(0,44)**	**(3,46)**	**19.51**	**1,16**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.597.417.308,00	-	-	5.469.552.773,00	3.469.550.773,00	(100,00)	0,00	0,00	(57,64)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	294.118.767.289,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	283.951.557.692,00	289.356.149.692,00	0,10	(3,30)	(0,10)	1,87

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
6	**PEMBIAYAAN**	**45.698.121.223,00**	**48.925.867.116,00**	**34.145.151.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,45**	**7,06**	**(30,21)**	**2,33**	**(292,96)**
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**45.698.121.223,00**	**47.138.508.565,00**	**34.145.151.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,45**	**3,15**	**(27,56)**	**2,33**	**(292,96)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.698.121.223,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**1.787.358.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(100,00)**	**0,00-**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.787.358.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**						
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**						
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024; dan (6) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2024.

Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Padang Lawas periode 2020-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024, Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, amanat Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dan Dokumen Perencanaan Strategis lainnya.

Lebih lanjut, Perwujudan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 difokuskan pada Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan dalam serangkaian strategi dan arah kebijakan. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2020-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),

Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2020-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Tema pembangunan RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2023 serta kebijakan pembangunan tahun 2023. **Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024** adalah **“ Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ”.**

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 **" Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "** dan tema RKP 2024 **" Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ",** Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup beberapa sasaran : Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing Usaha, Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-110
Rasio Gini (indeks)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
Nilai Tukar Petani (NTP)	105-108

Sumber: Rancangan RKP 2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Provinsi Sumatera Utara, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sumatera Utara. Dokumen RKPD 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Sumatera Utara dan mensinergikan program strategis Sumatera Utara dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan keunggulan wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Sumatera Utara.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
   a. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
   b. Meningkatnya derajat kesehatan;
   c. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
   a. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat;
   b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
   c. Meningkatnya kesejahteraan petani;
   d. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata.
3. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan
   a. Meningkatnya kinerja layanan sistem transportasi;
   b. Meningkatnya layanan infrastruktur permukiman;
   c. Meningkatnya kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan;
4. Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah;
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
   b. Meningkatnya ketangguhan bencana.
5. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas
   a. Meningkatnya keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima;
   d. Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   Meningkatnya penilaian kualitas pembangunan.

Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Hal -hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu: “**Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”** dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

Tabel. 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	**Peningkatan kualitas sumber daya manusia**	**IPM**	**Poin**	**72,85-73,15**
1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70,00
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	76,54
1.3	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,95
2	**Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif**	**LPE**	**Persen**	**5,00-5,20****
		Inflasi	**Persen**	**3±1 %****
		Gini Ratio	**Poin**	**0,324****
2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,25-8,15
2.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,80-5,50
2.3	Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP	Poin	109,92
2.4	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	7,11
3	**Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan**	**Indeks Infrastruktur**	**Poin**	**0,793**
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Juta Ton CO2eq**	**28,61**
3.1	Meningkatnya kinerja layanan sistem transportasi	Persentase jalan mantap	Persen	86,19
3.2	Meningkatnya layanan infrastruktur permukiman	Persentase cakupan layanan infrastruktur permukiman	Persen	70,33
3.3	Meningkatnya kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	55,10
3.4	Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah	Indeks WILIAMSON	Poin	0,3920
3.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,17
3.6	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	142,25
4	**Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin Predikat**	**70,00 (BB)**
4.1	Meningkatnya keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Opini	WTP
4.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	70,00 (BB)
4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,10 (A-)
4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	55,00-57,50 (Inovatif)
4.5	Meningkatnya penilaian kualitas pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	15

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi : 5,00-5,20 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi : 72,85-73,15;
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8,25-8,15 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi : 5,80-5,50 persen;
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,324 poin;
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 3±1 persen;
7. Emisi GRK menurun menjadi : 28,61 juta Ton CO2eq

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas, potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu–isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, maka ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu :

“ MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

BERIMAN : Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

CERDAS	:	Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.
SEHAT	:	Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi.
SEJAHTERA	:	Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
BERBUDAYA	:	Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.
KERJA KERAS	:	Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.
KERJA CERDAS	:	Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada, juga tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi,** dengan sistem yang demokrasi dan dengan membuat sistem informasi yang berbasis teknologi dapat membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan

menyempurnakan agar menjadi lebih bersih, baik, efektif, efisien, dan produktif serta berorientasi kepada publik.

2. **Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata,** karena kedekatan dan kepercayaan hubungan hanya dapat dibina melalui kegiatan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap masayarakat dengan menetapkan standar pelayanan publik dan pelayanan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya agar pelayanan tepat dan sesuai.
3. **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah,** karena di daerahnya rata-rata bermata pencaharian bertani dan berkebun harus mendorong peningkatan pengembangan dan nilai lebih sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga produknya dengan memfokuskan pembangunan ekonomi potensial masyarakat daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang di sesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong berkembangnya sektor industri dan kreatif lokal daerah yang berdaya saing tinggi, serta dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah.
4. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang,** karena wilayah memiliki lahan dan ruang yang masih luas dapat meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman termasuk juga akses peningkatan jalan, pasar, perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi serta transportasi publik.
5. **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal,** dengan melestarikan, menggali, memperkenalkan serta dengan meningkatkan norma dan adat istiadat, tradisi, budaya dan kearifan lokal, dan pranata lokal dalam rangka meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kehidupan beragama yang damai dan aman agar nantinya sebagai serambi mekah terwujud.

Sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada Pelaksanaan, Pencapaian dan Berkelanjutan pembangunan tahun 2022. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia serta Peningkatan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas, dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan;
4. Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Khususnya Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Damai dan Berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan, sasaran pencapaian pembangunan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ini :

Tabel. 4.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		TARGET	
								2018	Target	Realisasi	2023	2024
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	1.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	65,00	68,00	C/40,05*	69,00	70,00
				1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	C	C	C	CC	B
						Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	70(Baik)	78(Baik)	93,71(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)
						Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WDP	WTP	WTP*	WTP	WTP
						Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	%	50	90	90*	95	100
2.	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender			IPM	Poin	67,59	68,00	69,58	68,80-70,00	68,65-70,30
				2.1.1	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	N/A	70,25	68,75	72,36	74,53
				2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	N/A	71,56	61,87	72,28	73,00
				2.1.3	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,25	88,00	87,00	87,45	87,90

3.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	3.1	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB			Kontribusi PDRB PerKapita	Ribu (Rupiah)	N/A	28.497,88	54.575,87	28. 703,07	28.909,73
				3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	40,07	43,99	50,31	45,15	46,27
4.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang	4.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			Indeks Infrastruktur	Poin	75	80	80	84	88
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	72,04	70,99	72,60	73,12
				4.1.1	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Kondisi jalan mantap	Persen	14,76	56	25	59	62
						Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	59	68	66	75	80
						Rasio rumah layak huni	Persen	60,9	64	63	66	66
				4.1.2	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks kualitas Udara	Persen	80,00	75,00	92,47	80,00	85,00
						Indeks kualitas Air	Persen	60,00	64,00	58,75	77	78
						Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	95	100	95	100	100
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	5.1	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan local			Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	8*	12	12

						Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	6	4*	7	7
				5.1.1	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	7*	12	12
				5.1.2	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	5*	10	10
*Data Sementara												

Pada dasarnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas sudah selaras dengan dengan 7 Agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;	a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB;	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;	a. Pengembangan Kawasan Strategis; b. Pengembangan Sektor Unggulan; c. Pengembangan Kawasan Perkotaan; d. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi; e. Kelembagaan dan Keuangan Daerah.	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;	1. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni; 2. Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
					Wilayah;
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; c. Terpenuhinya layanan dasar; d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;	1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan; 2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan; 3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;	1. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan; 2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; 3. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender;	1. Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	1. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan; 2. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal;	1. Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan; 2. Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan;

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
	karakter bangsa; f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.				
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; b. Meningkatnya konektivitas wilayah; c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien; e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	1. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; 2. Peningkatan daya saing sektor agraris; 3. Peningkatan daya saing sektor pariwisata; 4. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB; 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; c. Pembangunan Rendah Karbon;	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan;	1. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;	1. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni; 2. Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	a. Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik;	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;	1. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;

RKPD Tahun 2024 adalah RKPD tahun terakhir pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2020-2024, tahun 2024 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan.

Berpedoman dari kondisi objektif pembangunan tahun - tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2022 serta target pada tahun 2023 dan 2024 dengan mencermati berbagai permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan Kabupaten padang Lawas disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 serta visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yaitu **: "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonomi ".**

Sejalan dengan tema tersebut, sasaran makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang ingin dicapai dalam RKPD Tahun 2024 adalah pemerataan beberapa pendapatan masyarakat yang tercermin dari Target Proyeksi P-RPJMD tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut :

1. IPM 68,65 – 70,30 Persen;
2. Persentase Kemiskinan 7,25 – 7,50 Persen;
3. Pertumbuhan Ekonomi 6,75 Persen;
4. Rasio Gini 0,198;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,90 – 5,20 Persen;
6. PDRB Perkapita (ADHK) 28.909,73.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2024 merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 yang mengacu pada kebijakan Provinsi dan Nasional yang tercantum dalam RKPD Provinsi 2024 dan RKP 2024 dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaiman tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 yaitu 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; 7) memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta berbagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam scenario pembangunan dalam RKP dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 mempertimbangkan arahan presiden Maka tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2024, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan ibu kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5 persen;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1 persen.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14 persen;
   b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
   e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
   - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
   - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4 persen-5,8 persen per target RPJMN 8,1 persen;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5 persen-20,6 persen per Target RPJMN 21,0 persen.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
   - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
   - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2 persen-7 persen;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27 persen;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17 persen.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95 persen/75 persen/65 persen;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76 persen akses layak dan 15 persen akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53 persen;
   d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 persen akses layak termasuk 12 persen akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

   Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100 persen;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100 persen;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100 persen.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam rangka RKP 2024 merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap:

1. **Prioritas Nasional 1**: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Prioritas Nasional 2**: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. **Prioritas Nasional 3**: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Prioritas Nasional 4:** Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Prioritas Nasional 5**: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. **Prioritas Nasional 6**: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. pembangunan rendah karbon.

7. **Prioritas Nasional 7**: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
   c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024

Berpedoman pada arah kebijakan yang telah diuraikan diatas serta berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka **tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024** adalah **“ Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara ”.**

Fokus Penetapan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dalam rangka dukungan pencapai target-target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. KSD sebagai kebijakan yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. KSD disusun dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan 4 (empat) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif;
3. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan;

4. Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah;
5. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Guna menjawab permasalahan/isu strategis Tahun 2024, maka pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas mengambil tema: **"Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonomi "**.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah Pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya) khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat dengan program prioritas dan kegiatan strategis daerah kabupaten padang lawas sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Kegiatan Strategis daerah:
   a. Pendidikan sejak dini melalui PAUD.
   b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas.
   c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
   d. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas.
   e. Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu.
2. **Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur** dengan Program Prioritas:
   a. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
   b. Peningkatan Jalan dan Jembatan Padang Lawas.
   c. Peningkatan Pengolahan Persampahan.
   d. Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi.
3. **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan** dengan Program Prioritas:
   a. Promosi produk unggulan daerah.
   b. Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.
   c. Pengembangan Daerah Irigasi.
4. **Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Khususnya Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Yang Damai dan Berkeadilan** dengan Program Prioritas:

a. Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
b. Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji.
c. Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah.
d. Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen.
e. Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024.

Program Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan Sumatera Utara merupakan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Program prioritas tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2024, program pembangunan yang terukur ditunjukan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Tema RKP 2024 **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**	**Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024** **"Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"**	**Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024** **"Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"**
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
(1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama. c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi. h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).	**(1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Program Prioritas: a. Pendidikan sejak dini melalui PAUD. b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas. c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. d. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas. e. Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu.

	i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana. n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	
(2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	**(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama. c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi.	**(1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Program Prioritas: a. Pendidikan sejak dini melalui PAUD. b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas. c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. d. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas. e. Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu.

	h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana. n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	
(3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	**(2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** dengan kegiatan Prioritas: a. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC). b. Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri). c. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi. d. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani. e. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM) Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan). f. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata.	**(3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan** dengan Program Prioritas: a. Promosi produk unggulan daerah. b. Promosi dan pengembangan branding wisata daerah. c. Pengembangan Daerah Irigasi.

	g. Pengembangan Wellnes / Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Penataan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi. h. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. i. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata. j. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif. k. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.	
(3) Penguatan Daya Saing	**(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama. c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi.	**(1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Program Prioritas: a. Pendidikan sejak dini melalui PAUD. b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas. c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. d. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas. e. Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu.

	h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana. n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	
(4) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	**(2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** dengan kegiatan Prioritas: a. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC). b. Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri). c. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi. d. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani. e. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM) Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan). f. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan	**(3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan** dengan Program Prioritas: d. Promosi produk unggulan daerah. e. Promosi dan pengembangan branding wisata daerah. f. Pengembangan Daerah Irigasi.

	kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata. g. Pengembangan Wellnes / Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Penataan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi. h. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. i. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata. j. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif. k. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.	
(5) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	**(3) Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yg Berkelanjutan** dengan kegiatan Prioritas: a. Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi. b. Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi. c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman. d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang. e. Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias. f. Pembangunan SPAM Mebidang dan Seriti. g. Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah. h. Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu. i. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwsata. j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah. k. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan “SUMUT HIJAU”.	**(2) Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur** dengan Program Prioritas: a. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah. b. Peningkatan Jalan dan Jembatan Padang Lawas. c. Peningkatan Pengolahan Persampahan. d. Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi.

	(4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif dengan kegiatan Prioritas**:** a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB. c. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri. d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi capaian pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Week.	
(6) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	**(3) Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yg Berkelanjutan** dengan kegiatan Prioritas: a. Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi. b. Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi. c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman. d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang. e. Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias. f. Pembangunan SPAM Mebidang dan Seriti. g. Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah. h. Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu. i. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwsata. j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah. k. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan “SUMUT HIJAU”.	**(2) Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur** dengan Program Prioritas: a. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah. b. Peningkatan Jalan dan Jembatan Padang Lawas. c. Peningkatan Pengolahan Persampahan. a. Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi.

(8) dan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024	**(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama. c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi. h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana.	**(5) Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Khususnya Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Yang Damai dan Berkeadilan** dengan Program Prioritas: a. Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. b. Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji. c. Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah. d. Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen. e. Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024.

	n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	

Sementara itu Program Prioritas, kegiatan prioritas pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sub Kegiatan Prioritas dan Lokasi
RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**						
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**						
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
							dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Nonformal/Kesetaraan		
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas	31.080.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Kesehatan		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Ketertiban Umum		

4.3. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Usulan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rencana kegiatan pada Perangkat Daerah. Usulan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas diliput pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas tahun 2023

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)					
1	**H. SYAHWIL NASUTION, SE**					
1	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Tanah Wakaf Desa Pasar Panyabungan Kecamatan Huta Raja Tinggi	Pasar Panyabungan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Masjid Al- Ikhlas Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi	Sigalapung	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
3	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan MCK Masjid Al-Ikhlas Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi	Sigalapung	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
4	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Tanah Wakaf (TPU) Desa Huta Raja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi	Huta Raja Tinggi	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2	**H. LOKOT NASUTION**					
5	H. LOKOT NASUTION	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan Tempat Mandi dan Tempat Wudhu di Masjid Desa Siundol Julu	Siundol Julu	Sosopan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
6	H. LOKOT NASUTION	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan MCK di Masjid Aek Mage di Desa Siundol Jae	Siundol Jae	Sosopan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
7	H. LOKOT NASUTION	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Rabat Beton di Desa Huta Bargot	Huta Bargot	Sosopan	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	**MUHAMMAD YASIN HARAHAP**					
8	MUHAMMAD YASIN HARAHAP	Pembangunan Pagar Pendidikan	Pembuatan Pagar Pondok Pesantren Darul Ma'arif Gunung Inten	Gunung Inten	Barumun Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	MUHAMMAD YASIN HARAHAP	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pengadaan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Darul Ma'arif Gunung Inten Sebanyak 3 Ruang	Gunung Inten	Barumun Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	**H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH**					
10	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan Rabat Beton Pesantren Darul Falah Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
11	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan MCK Dan Sumur Bor Desa Tanjung Botung Kecamatan Sosa	Tanjung Botung	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Jalan	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mondang Kecamatan Sosa	Desa Mondang	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	**AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I**					
13	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani ke Saba Pasir Kecamatan Barumun Barat	Saba Pasir	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
14	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Pembukaan Jalan Usaha Tani Bulu Parapat Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Alat Pertanian	Pengadaan Alat Mesin pertanian Desa Barumun jae, 5 unit	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
16	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran Pondok Paramalan Parsulukan Al-Amran Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
17	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Pembukaan Jalan Usaha Tani Galanggang Baru Menuju Bulu Parapat Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan Tali Air Saba Manggu Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Dek Jembatan Bondar Irigasi Saba Sidongdong Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Desa Parannapa Dolok Bire menuju Desa Hutaruhom Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Hutaruhom	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
21	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Raya Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
22	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Ternak	Pengadaan Kelompok Tani Ternak Sahata Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun	Padang Hasior	Sihapas	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
23	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pengadaan Tali Air Saba Julu Desa Batu Sundung Kecamatan Barumun Barat	Batu Sundung	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)					
6	**NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH**					
24	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembuatan Pagar Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
25	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Pembuatan Kanopi Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
26	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Penimbunan di Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)					
7	**H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
27	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Dari Desa Sabarimba menuju Saba Lappisi Kecamatan Barumu Baru (Lanjutan)	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS Syakira Desa Janji Lobi	Janji Lobi	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Pendidikan Desa Sibuhuan Jae Menuju Jalur II Sisupak Sepanjang 2 KM	Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Pemakaman (TPU) Sepanjang Kurang Lebih 300 M Didesa Mompang	Mompang	Barumun Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
31	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Bendungan Diaek Batang Taris Desa Mompang	Mompang	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sitarolo Julu Menuju Desa Pintu Padang (Lanjutan)	Sitarolo	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembngunan jalan dari parmata sapihak menuju Limbong lama (lanjutan) 1 paket	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
34	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan pagar mesjid Al-Abror Desa siolip 1 paket	Siolip	Barumun Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
35	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Aek Barumun (Desa Sabarimba)	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Speaker Desa Tanjung Botung menuju Desa Sayur Matua 1 paket	Tanjung Botung dan Sayur Matua	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Desa Hasahatan Julu menuju Desa Siolip 1 Paket	Hasahatan Julu dan Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	**ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE**					
38	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Ulu Gajah Menuju Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah	Desa Ulu Gajah Menuju Desa Bahal Batu	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
39	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Dari Desa Siboris Dolok Menuju Desa Pangirkiran Kecamatan Barumun Tengah	Desa Siboris Dolok Menuju Desa Pangirkiran	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
40	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran TPU Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
41	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pengadaan Ternak	Pengadaan Ternak Lembu Kelompok Tani Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
42	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok Mesjid Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
9	**MARAGANTI HASIBUAN**					
43	MARAGANTI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran dranase kiri dan kanan jalan mayor Daulat Hasibuan	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	**MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi**					
44	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Parit Desa Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam	Botung	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
45	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan RKB(Ruang Kelas Baru) MDA AL-ISTIQOMAH Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
46	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
47	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembuatan MCK Permukiman	Pembuatan MCK Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
48	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Tempat Pemondokan	Pembangunan Aula Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS SOSIAL
	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)					
11	**BAHARUDDIN DAULAY**					
50	BAHARUDDIN DAULAY	Pembangunan Jalan	Pembangunan Embung Aek Honas Desa Binanga	Desa Binanga	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)					
12	**SAHRUN HASIBUAN**					
51	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran kuburan desa sungai korang(lanjutan)	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
52	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Mesjid	Pembangunan mesjid taqwa muhammadiyah desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
53	SAHRUN HASIBUAN	Pengadaan Ternak	Pengadaan ternak lembu kelompok tani desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
54	SAHRUN HASIBUAN	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan jalan rabat beton desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Madrasyah NU desa mananti	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
56	SAHRUN HASIBUAN	Pengadaan Ternak	Pengadaan ternak lembu kelompok tani desa Aliaga	Aliaga	Hutaraja Tinggi	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
13	**SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
57	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan kekebun masyarakat wilayah pilar dan lappisi desa limbong dan desa siolip kecamatan barumun baru	Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
58	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan 1 Ruang kelas baru di MTS 7 Muhammadiyah desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru	Hasahatan Julu	Barumun Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
59	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan lingkar luar Desa Hasahatan Jae menuju Jalinsum	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
60	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Hasahatan Jae	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
61	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Plat Duiker 12 titik di jalan kebun masyarakat desa Simaninggir dan Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru	Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
62	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pengadaan Ternak	Pengadaan Bibit ternak lembu Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
63	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
14	**MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
64	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Pembangunan Pagar Permukiman	Lanjutan Pembangunan Pagar Mesjid Al- Mukhlisin Desa Binanga Tolu Kecamatan Huristak	Binanga Tolu	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
65	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan (Dengan Rabat Beton) Anak Desa Binanga Tolu - Rambin Paya Bujing Kecamatan HuristAK	Binanga Tolu	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Lapis Pondasi dengan peyertuan 500 Meter) Desa Bulu Cina Kecamatan Huristak	Bulucina	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
67	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pengadaan Air Bersih Dengan Sumur Bor Lengkap Dengan Tangki Penampung Kapasitas 2000 Liter dan 3 Buah Titik Distribusi di Desa Tor Sihoda-Hoda Kecamatan Huristak	Tor Sihoda-Hoda	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	**SYARIF LUBIS, S.E**					
68	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Mesjid	Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Air Bale Kec. Sosa	Air Bale	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
69	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Mini Desa Rao Rao Dolok Kec. Sosa	Rao Rao Dolok	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
70	SYARIF LUBIS, S.E	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Alat Bermain TK Aba Pasar Ujung Batu Kec. Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
71	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Mesjid	Pembangunan Musollah Khaerul Amin Desa Aek Tinga Kec. Sosa	Aek Tinga	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
72	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Sambungan Normalisasi Aek Takki Desa Pasar Ujung Batu Kec. Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
73	SYARIF LUBIS, S.E	Pengadaan Ternak	Pengadaan Ternak Lembu Kelompok Tani Berkemajuan Desa Aek Tinga Kec. Sosa	Aek Tinga	Sosa	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)					
16	**LUAT HASIBUAN**					
74	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan SMK N 1 Kecamatan Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
75	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehab Jalan Usaha Tani Singobuk desa Siadam Kec. Batang Lubu Sutam	Siadam	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
76	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kebun Rimbo Pinarik kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
77	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehab jalan Usaha Tani Galanggangayom desa Botung kec. Batang Lubu sutam	Botung	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
78	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Rabat Beton Desa Pinarik kec. Batang Lubu sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
79	LUAT HASIBUAN	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Rambin Sipasir desa Pinarik kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
80	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Peningkatan jalan Pinarik - Papaso kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	**ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH**					
81	ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase telaga aek Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
82	ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok masjid Babul Jannah Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
18	**H.TORKIS AFGANI HASIBUAN**					
83	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Rabat beton 200m, desa lubuk bunut, lorong 2 kecamatan hutaraja tinggi	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
84	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan paret dan gorong-gorong jalan, Desa Tanjung Ale 200m, Kec. Sosa Timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
85	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Penerangan Jalan	Pembuatan lampu jalan tenaga surya antara desa tanjung ale dan desa sigalagala sebanyak 20 buah lampu kec. sosa timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
86	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas baru sd negeri 0701 rotan sogo kec. hutaraja tinggi	Rotan Sogo	Hutaraja Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
87	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton 300m desa parmainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
88	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase atau parct jalan 200m desa permainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
89	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Penerangan Jalan	Pemasangan lampu jalan 16 titik desa parmainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
90	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran tanah wakaf 100m desa mananti kecamatan hutaraja tinggi	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
91	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan sarana dan prasarana mesjid desa mananti	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
92	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan gantung / rambin sungai sosa di desa lubuk bunut	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
18	**ARFIN HASIBUAN, M.Pd**					
93	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan keliling Desa Manggis	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
94	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Sumur Bors	Pembangunan sumur bors desa tanjung baru	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
95	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	pembangunan DEK jalan desa tanjung baru	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan TPU Desa Manggis	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
97	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan Jalan	Pembangunan Rabat Beton PON-PES Babul Hasanah	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	**ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos**					
98	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pembangunan Jalan	Pengerasan Jalan Galabonang Menuju SMP Negeri 1 Atap Tobing Jae	Galabonang	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
99	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan / Pengerasan Jalan Sigading Menuju Simpang Babinsa	Sigading	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mobiler Sekolah yayasan Islamic center Nurhamidah	Pasar Binanga	Barumun Tengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
101	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mobiler MDTA Babussalam Siala Gundi	Sialagindi	Huristak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	**H. FAHMI ANWAR NASUTION**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
102	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru Ponpes Ali Baharuddin Kel Pasar Sibuhuan	Sigala-gala	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
103	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT Insan Robbani Kel. Pasar Sibuhuan	Lingkungan IV Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
104	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru Ponpes Almukhlisin Kel. Pasar Sibuhuan	Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
105	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan Jalan Setapak Tanah Wakaf Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	PARTAI DEMOKRAT					
21	**MHD.DAYAN HASIBUAN, SH**					
106	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa parmainan kec hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
107	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa lubuk bunut kec hutaraja tinggi	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
108	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton desa lubuk bunut	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
109	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jembatan	Pembangunan box culverb desa pir trans sosa 4	Pir Trans Sosa IV	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
110	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Pembangunan teras masjid annur aek tong tong pasar sibuhuan kec barumun	Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan,	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
111	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa simangambat kec sosa timur	Simangambat	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
112	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa gunung inten	Gunung Inten	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
113	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase desa tanjung ale kec sosa timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	**HASAN BASRI HASIBUAN**					
113	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa siborna kec sosa julu	Siborna	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
114	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa pasir julu kec. sosa julu	Pasir Julu	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
115	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Sekolah	Rehab MDA desa mananti sosa julu	Mananti Sosa Julu	Sosa Julu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
116	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan rambin aek sosa desa siginduang	Siginduang	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
117	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Mesjid	Pembangunan menara masjid desa ampolu	Ampolu	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
118	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pengadaan saringan air bersi desa tanjung bale kec.sosa	Tanjung Bale	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
119	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
120	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa janji raja kec sosa	Janji Raja	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
121	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa ramba kec sosa julu	Ramba	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
122	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan rambin desa tanjung kec sosa julu	Tanjung	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
123	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton desa roburan	Roburan	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
124	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pengadaan tiang listrik desa hurung jilok	Hurung Jilok	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
125	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
126	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
127	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa tanjung bale kec sosa	Tanjung Bale	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
128	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa sungaI Jior kec sosa julu	Sungai Jior	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
23	**PADELI ASHARI HASIBUAN**					
129	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Banua Tonga menuju Batang Bulu Baru	Banua Tonga	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
130	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan sihoping di Desa Batang Bulu Lama	Batang Bulu Lama	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
131	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Perit Pembuangan air di Desa Pagur Satio	Pagur Satio	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)					
24	**MUHAMMAD ALWI LUBIS**					
132	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembuatan Bronjong di Sungai Aek Godang Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
133	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Dek Penahan Banjir di Sungai Aek Godang Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
134	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	**RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS**					
135	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Aula Sekolah	REHAB BERAT AULA TERBUKA TK SUTAN SINALOAN LUBIS	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
136	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pengadaan Ternak	Pengadaan Lembu kelompok tani desa pasar latong kecamatan lubuk barumun	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
137	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Rehab Mesjid	Rehab Menara Mesjid AL MARDIYAH PASAR LATONG Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
138	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas baru TK Sutan Sinaloan	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
139	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	pengaspalan jalan desa pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
140	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan lingkar pekan pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
141	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan lingkar lr 1 desa pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
142	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan desa huta dolok	Huta Dolok	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)					
26	**H. PULI PARISAN LUBIS, Lc**					
143	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Dilingkungan VI Pasar Sibuhuan	Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
144	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Bronjong/ Penahan Air Sungai Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
145	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Rehab Sekolah	Pembangunan Rehab Sekolah MDA Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
146	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
147	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan Air Bersih Di Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan Air Bersih Di Desa Paringgonan Julu	Paringgonan Julu	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)					
27	**RAJA PARLINDUNGAN NST, ST**					
149	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Desa Purba Tua Kecamatan Barumun	Purba Tua	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
150	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Ad-Du'a Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun	Bulu Sonik	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
151	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Al-Khuldi Desa Bangun Raya Kecamatan Barumun	Bangun Raya	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
29	**KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked**					
152	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Padang Garugur Jae Kec. Aek Nabara Barumun	Padang Garugur Jae	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
153	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Aek Nabara Jae / Pakkal Dolok, Kec. Aek Nabara Barumun	Aek Nabara Jae / Pakkal Dolok	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
154	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Dek Penahan Bendungan Aek Ukka Desa PP Makmur Kec. Barumun Tengah	PP Makmur	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
155	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembuatan MCK Mesjid Di Desa Sipagabu, Kec. Aek Nabara Barumun	Sipagabu	Aek Nabara Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
156	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Rekonstruksi Jalan	Penyertuan Jalan Aek Nalomlom Desa Padang Garugur Jae, Kec. Aek Nabara Barumun	Padang Garugur Jae	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)					
30	**JENTI MUTIARA**					
157	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan RT. 11 Desa Ujung Batu V, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
158	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Desa Ujung Batu III, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu III	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
159	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ujung Batu I, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu I	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
160	JENTI MUTIARA	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Penggantian Lantai Jembatan Sungai Meranti Desa Ujung Batu II, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu II	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
161	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ujung Batu IV, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu IV	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
162	JENTI MUTIARA	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Ujung Batu V Menuju Desa Ujung Batu I, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
163	JENTI MUTIARA	Pembangunan Jembatan	Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Ledoan Desa Ujung Batu V, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.8

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas perFraksi tahun 2023

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH (POKIR DPRD)	JUMLAH (ORANG)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	13	3
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	19	3
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	7	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	23	5
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	11	2
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	6	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	8	2
8	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	3	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	22	4
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	22	4
11	PARTAI DEMOKRAT	26	3
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1	1
JUMLAH		163	30

4.4. Inovasi

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Padang Lawas perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Inovasi pembangunan (inovasi pelayanan publik) Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 adalah dengan Optimalisasi percepatan pelaporan BMD dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sendiri merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Perbup No. 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Padang Lawas.

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Padang Lawas harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Padang Lawas.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Belanja Sementara Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 1.137.014.106.124,00. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sarat layanan minimal.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.277,00	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.128.122.508.129,00	2,76	(3,50)	6,00	3,40
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	47.501.937.457,00	6,14	18,50	58,55	(84,93)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.058.939.820.672,00	35,82	(,82)	3,01	5,39
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	21.680.750.000	(85,97)	(100,00)	0,00	100,00
5	**BELANJA**	1.035.264.004.096,00	1.076.597.652.225,00	1.053.281.447.741,00	1.124.661.780.131,00	1.137.014.106.124,00	3,99	(2,17)	6,78	1,09
5,1	BELANJA OPERASI	582.197.337.553,00	633.728.776.587,00	630.470.986.646,00	685.795.447.416,00	721.007.988.227,00	8,85	(,51)	8,78	4,89
5,2	BELANJA MODAL	143.366.541.800,00	145.733.333.116,00	134.826.465.820,00	146.504.332.112,00	118.913.101.554,00	1,65	(7,48)	8,66	(23,20)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	4.267.313.878,00	(80,46)	37,53	(21,72)	31,08
5,4	BELANJA TRANSFER	295.716.184.597,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	289.421.110.465,00	292.825.702.465,00	(0,44)	(3,46)	1,83	1,16
	Total Surplus/(Defisit)	1.440.387.349,00	(11.233.613.948,00)	(25.253.553.041,91)	(34.940.201.878,00)	(8.891.597.995,00)	(879,90)	124,80	38,36	(292,96)
6	**PEMBIAYAAN**	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.787.358.551,00	-	-	-	0,00	(100,00)	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	45.698.121.224,00	45.351.150.014,00	34.127.691.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	(0,76)	(24,75)	2,38	(74,55)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		47.138.508.565,00	34.117.536.066,36	8.891.597.995,45	-	-	(27,62)	(73,94)	(100,00)	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data dikelola

Proyeksi belanja daerah tahun 2024 selanjutnya di jabarkan dalam rencana pagu indikatif per organisasi perangkat daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 5.2
Rencana Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas
Tahun2024

NO	NAMA OPD	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	314.956.722.203,00
2	DINAS KESEHATAN	116.793.355.622,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	38.818.266.734,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	95.323.440.643,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DANPERHUBUNGAN	15.645.083.616,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMKEBAKARAN	4.385.257.351,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.816.022.015,00
8	DINAS SOSIAL	6.004.952.919,00
9	DINAS TENAGA KERJA	2.175.342.376,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.738.005.764,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.570.949.671,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.888.582.754,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3.370.378.481,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.137.047.666,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.319.724.061,00
16	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN	2.871.915.958,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU	2.522.923.216,00
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.462.246.408,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.691.206.089,00
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.876.955.263,00
21	DINAS PERTANIAN	13.808.014.929,00
22	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	22.434.490.440,00
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN	38.250.073.501,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.739.245.640,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSETDAERAH	316.454.668.925,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.102.818.573,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA	5.816.138.947,00
28	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANGLAWAS	6.922.833.715,00

NO	NAMA OPD	PAGU INDIKATIF
29	KECAMATAN BARUMUN	2.170.369.949,00
30	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2.132.926.381,00
31	KECAMATAN HURISTAK	1.423.412.926,00
32	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1.087.917.162,00
33	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1.950.160.582,00
34	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2.302.767.693,00
35	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1.492.085.255,00
36	KECAMATAN SOSA	2.222.939.861,00
37	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	1.951.008.596,00
38	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1.377.637.996,00
39	KECAMATAN ULU BARUMUN	1.470.392.338,00
40	KECAMATAN SOSOPAN	1.455.066.960,00
41	KECAMATAN BARUMUN BARU	1.058.908.213,00
42	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1.385.487.729,00
43	KECAMATAN SOSA JULU	1.374.659.784,00
44	KECAMATAN ULU SOSA	1.522.202.070,00
45	KECAMATAN SOSA TIMUR	1.631.191.905,00
46	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52.108.307.244,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023

Adapun rincian program Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang disertai dengan sasaran dan perioritas pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran rencana program tahun 2024. Rencana pembangunan di Kabupaten Padang Lawas dapat ditujukan untuk mencapai pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dalam rencana kerja program serta dengan anggaran yang ada pada perangkat daerah. Program prioritas pembangunan merupakan sasaran pembangunan utama baik nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. Program dapat mendukung prioritas rencana kerja pembangunan pemerintahan merupakan keberhasilan suatu daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2024 memberikan dukungan melalui program sebagai berikut :

Tabel 5.3

Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**						
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**						
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023

Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

Rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyusun rencana program dan kegiatan disertai anggaran, yang juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan prioritas nasional dan Provinsi Tahun 2024. Adapun ringkasan dari dukungan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap prioritas nasional dan Provinsi disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 5.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang Mendukung Prioritas Nasional
Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.068.786.463	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40,590,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	111,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	37,218,267	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.000.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	63.747.000	DINAS PERTANIAN
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan danmenjamin pemerataan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	135.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	66.303.674	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	154.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.897.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.289.818.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.215.867.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	540,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.840.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.290.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Vaksin	141,600,000	DINAS KESEHATAN
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	243,837,600	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	31,080,000	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	370,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	193,742,000	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	20,884,357,000	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,061,100,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	116,046,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	515,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	105.220.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	187.046.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,769,810,180	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1,300,557,606	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	433,707,120	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	202.862.460	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	265.181.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.194.108.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,029,297,246	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	265,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	93.236.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	75.870.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penumbuhan Kesadaran	92.907.000	DINAS LINGKUNGAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat		HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,388,940,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48,949,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	120.500.000	DINAS SOSIAL

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.007.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.217.835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.032.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	116.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	143.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.559.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	58.397.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76.774.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	44.163.689	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.914.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.025.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.652.260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.315.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	440.774.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.205.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86.065.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.779.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.615.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.725.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.550.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.363.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	74.553.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.703.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.583.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.787.680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	47.723.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.267.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	143.130.470	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	43.319.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.513.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94.736.810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.724.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.035.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.280.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.730.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	181.050.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	199.842.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.179.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.172.630	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.899.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.132.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	132.935.900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.963.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.813.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.598.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengamanan Barang Milik Daerah	400.430.400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penilaian Barang Milik Daerah	76.333.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.283.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	85.167.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.351.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70.895.200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68.568.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104.527.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	133.995.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.240.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	129.475.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.466.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	61.045.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penagihan Pajak Daerah	70.410.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	88.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80.247.602	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	91.970.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.845.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.574.200	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Tabel 5.5

Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	540,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.840.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.290.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Vaksin	141,600,000	DINAS KESEHATAN
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	243,837,600	DINAS KESEHATAN
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	31,080,000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	370,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	193,742,000	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	20,884,357,000	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,061,100,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40,000,000	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	116,046,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	515,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	105.220.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	187.046.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.897.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.289.818.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.215.867.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inlusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.068.786.463	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40,590,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	111,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	37,218,267	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.000.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	63.747.000	DINAS PERTANIAN
3	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.194.108.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,029,297,246	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.007.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.217.835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.032.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	116.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	143.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.559.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	58.397.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76.774.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	44.163.689	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.914.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.025.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.652.260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.315.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	440.774.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.205.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86.065.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.779.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.615.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.725.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.550.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.363.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	74.553.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.703.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.583.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.787.680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	47.723.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.267.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	143.130.470	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	43.319.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.513.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94.736.810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.724.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.035.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.280.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.730.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	181.050.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	199.842.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.179.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.172.630	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.899.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.132.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	132.935.900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.963.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.813.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.598.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengamanan Barang Milik Daerah	400.430.400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penilaian Barang Milik Daerah	76.333.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.283.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	85.167.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.351.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70.895.200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68.568.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104.527.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	133.995.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.240.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	129.475.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.466.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	61.045.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penagihan Pajak Daerah	70.410.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	88.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80.247.602	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	91.970.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.845.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.574.200	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencakup Indikator Kinerja Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, ditambahkan indikator Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK Per Kapita) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		Target	
			Target	Realisasi	2023	2024
1.	IPM	Persen	68,00	69,58	68,80 – 70,00	68.65-70,30
2.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,75	8,05	8,30 – 8,50	7,25-7,50
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,5	4,61	4,00 – 4,50	6,75
4.	Indeks Gini	Poin	0,218	0,227	0,198	0,198
5.	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4,00	5,90	3,25 – 3,50	4.90-5.20
6.	PDRB Perkapita (ADHK)	Nilai (Rp)	34.024.43	14.586,76	34.024.43 - 36.047.75	28.909,73

Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2
Proyeksi Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	Proyeksi	
			2022	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	68,00	40,05*	69 ,00	70,0
2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,00	87,00	87,45	87,90
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,04	70,99	72,60	73,12
	Indeks Kualitas Udara	Persen	75,00	92,47	80,00	92,50
	Indeks Kualitas Air	Persen	64,00	58,75	77,00	78,00
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	9,02*	95,00	100
6	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	78 (Baik)	93,71 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	Tahun	9,75	9,31	9,95	10,15
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	146	140	135

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2022

Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Berikut adalah Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas.

untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*).

Tabel 6.3

Proyeksi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 - 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	135	132,43	97,39	33,83	98,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93,60	92,16	94,50	91,34	94,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92,40	24,10	86,50	88,18	87,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	97,52	2,68	96,32	94,00	96,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	7,00	100	7,01	100	7,05	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS RujukanTingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	0,02	100	0,02	100	0,02	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	70,40	100	64,6	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	50,01	100	52,29	100	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	53,61	100	52,27	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	46,29	100	28,00	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	99,03	100	96,73	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	26,30	100	6,5	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	48,00	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	0,18	100	10,25	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	0,88	100	30,00	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	59,90	100	59,90	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	67,05	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	0,43	100	18,5	100	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	65,00	64,00	70,00	75,6	83,00	Dinas Pekerjaan Umum
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 4.846 x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS	Persen	65,00	64,00	70,00	75,6	83,00	Dinas Pekerjaan Umum

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Kewenangan Kab/Kota (ha)							
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	30,50	30,90	35,00	34,6	43,00	Dinas Pekerjaan Umum
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	18,00	18,00	20,00	20,5	25,00	Dinas Pekerjaan Umum
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	45,00	45,00	60,00	60,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Km	210	215	250	283	330	Dinas Pekerjaan Umum
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	-	-	-	24,00	Dinas Pekerjaan Umum
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	-	-	-	-	200	Dinas Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	0	100	0	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0	100	0	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								dan Perhubungan
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	50,00	100	0	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	100	50,00	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	95,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	36,53	63,17	63,49	90,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	96,41	100	90,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	75,0	91,8	92,3	90,00	93,3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	87,00	67,00	65,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jam/Menit	20 Menit	30 Menit	40 Menit	35 Menit	30 Menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	19,10	19,10	20,00	25,5	30,00	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
	Tenaga Kerja							
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,00	30,00	30,00	35,00	50,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
2	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	60,00	64,50	65,03	65,11	65,20	Dinas Tenaga Kerja
3	Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	20,00	30,00	30,00	35,00	45,00	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,50	0,09	0,50	0,02	1,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,02	0,016	0,014	0,014	0,014	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,54	0,57	0,77	1,55	0	Dinas Pengendalian Penduduk

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100	4,45	100	0	100	Dinas Ketahanan Pangan
	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Persen	71,52	74,51	72,04	70,99	73,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	9,80	9,85	10,12	13,00	10,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	11,11	0	11,11	0	11,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	95,00	90,00	100	90,00*	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	30,00	12,55	50,00	12,55*	90,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	92,00	86,00	95,00	86,00*	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	6 OPD	3 OPD	7 OPD	3 OPD*	25 OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	8,00	2,6	8,00	7,9	9,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	0	1,00	0,33	2,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,77	3,70	3,63	3,67	3,49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	50,00	68,10	60,00	10,56	80,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	20,00	19,06	18,00	28,00	14,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Perhubungan							

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	0,0001541	0,0001535	0,000149	0,000149	0,000152	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
		Satuan mobil penumpang /jam	0,023 smp / jam	0,020 smp / jam	0,025 smp / jam	0,025 smp / jam	0,034 smp / jam	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Persen	0	0	0,67	0,67	0,69	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika							
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah	29	10	29	10	29	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	80,00	70,00	80,00	70,00*	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	20,00	4,00	25,00	4,00*	40,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Persen	18,00	18,00	25,00	30,00	35,00	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	14,00	14,00	20,00	25,00	30,00	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	15,00	17,00	100	106,71	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	100	69,44	100	59,51	100	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	40,00	29.64	50,00	73,38	75,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	1,00	0	1,00	0	1,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	45,00	2,00	3,00	2,00*	5,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah	5	100	5	26	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pilihan								
	Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah	4345.35	3937.74	4127	4.223,69	4383	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-	-	-	0	-	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	50,00	50,00	50,00	25,45	50,00	Dinas Pemuda Olahraga dan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	50,00	0,96	50,00	16,38	50,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rupiah	2.000.000	0	5.000.000	5.000.00	5.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	2.000.000	4.950.000	5.000.000	5,500,000	5.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	5,00	4,00	4,50	4,20	5,50	Dinas Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 91	Jumlah kasus : 15	Dinas Pertanian
		Persen	persentasi penurunan 2,00	persentasi penurunan 2,00	persentasi penurunan 2,00	persentasi penurunan 5,00	persentasi penurunan 2,00	Dinas Pertanian
	Perdagangan							

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	0,50	0,30	0,50	0,36	0,70	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	75,00	68,70	75,00	68,70	77,00	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP bertanda terasah yang berlaku	Persen	2,00	1,91	2,50	4,8	3,35	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Jumlah	20	73	20	44	20	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah	10	13	10	13	10	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
3	Tersedianya informasi ndustry secara lengkap dan terkini	Persen	100	60,00	100	60,00	100	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	17,51	3,05	18,09	7,00	18,90	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	17,50	21,75	17,75	17,75	32,50	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	12,50	3,50	13,83	5,00	16,67	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	25,00*	21,09*	12,00*	21,09*	12,00*	Badan Pendapatan Daerah
2	Rasio PAD	Persen	9,00*	8,50*	90,00*	8,50*	95,00*	Badan Pendapatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas	Level 2*	Level 2*	level 3*	Level 2*	level 3*	Badan Pendapatan Daerah
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat/Level Kapabilitas	Level 2*	Level 2*	level 3*	Level 2*	level 3*	Badan Pendapatan Daerah
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	80,00*	79,00*	100 *	79,00*	100 *	Badan Pendapatan Daerah
6	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	Badan Pendapatan Daerah
	Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	5,00	4,00	3,00	1,00	1,00	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	38,00	60,00	18,00	60,00	Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	50,00	47,00	60,00	45,00	70,00	Sekretariat Daerah
	Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	66,5	70,2	74,0	85,5	95,0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	9,40	9,10	26,10	75,00	38,60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	69,00	68,00	27,10	69,00	70,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	95,00*	94,64*	100*	94,64*	100*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	80,00*	75,00*	100*	75,00*	100*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
3	Manajemen Aset	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada*	Ada	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	100*	100*	100*	100*	100*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Sumber :Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM di tetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan,kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan spm tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator spm dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Mengumpulkan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan target indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.4
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Padang Lawas

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
I	**Pendidikan**							
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	100%	33.83	100%	100%
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-15 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	100%	99.69	100%	100%
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-18 Tahun Yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	100%	2.46	100%	100%
II	**Kesehatan**							
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	64,66%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52,29%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52,27%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	28,0%	100%	100%

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	96,73%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	6,5%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	48%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hiipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	10,25%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	30%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	50,90%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodefici ency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	18,5%	100%	100%
III	**Pekerjaan Umum**							

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	3%	Setiap Tahun	3%	3%	5%	7%
	Penyediaan layanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	100%	-	-	-
IV	**Perumahan Rakyat**							
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	0	100%	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	0	100%	100%
V	**Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindugan Masyarakat**							
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
VI	**Sosial**							
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	14,53%	100%	100%
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	8,08%	100%	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	23,9%	100%	100%
	Rehabiltasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	13,04%	100%	100%
	Perlindugan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	100%	90%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

KUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 merupakan Kebijakan umum Apbd Kabupaten Padang Lawas yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang tersedia untuk periode satu tahun.

Penyusunan dokumen KUA ini telah melalui seluruh tahapan secara sistematis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar yang ditempuh dalam merampungkan dokumen KUA ini yaitu melalui dokumen RKPD Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas. Hasil penyusunan KUA Kabupaten Padang Lawas merupakan panduan untuk penyusunan PPAS tahun 2024.

Plt. BUPATI PADANG LAWAS

Drg. H AHMAD ZARNAWI PASARIBU. CHt.MM.Msi,MH